

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 268 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dispakan adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pangan dan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Dispakan yang selanjutnya disebut Renstra Dispakan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja Dispakan yang selanjutnya disebut Renja Dispakan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP RENSTRA DISPAKAN

Pasal 2

Dokumen Renstra Dispakan merupakan dokumen perencanaan strategis Dispakan untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dispakan yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Dispakan yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Dispakan bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dispakan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Dispakan dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Dispakan agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dispakan;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dispakan;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dispakan.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA DISPAKAN

Pasal 4

(1) Renstra Dispakan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Dispakan dalam menyusun Renja Dispakan.

(2) Renstra Dispakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Dispakan paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Dispakan; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Dispakan.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Dispakan Tahun 2025-2029;
   2. strategi Dispakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Dispakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Dispakan; dan
   4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Dispakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DISPAKAN

Pasal 5

(1) Dispakan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dispakan dan evaluasi hasil Renstra Dispakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Dispakan terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Dispakan.

(3) Kepala Dispakan menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Dispakan.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA DISPAKAN

Pasal 6

Perubahan Renstra Dispakan dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Dispakan mempedomani perubahan RPJMD;

b. perubahan Renstra Dispakan dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan

c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Dispakan, maka Renstra Dispakan dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Dispakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Dispakan Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Dispakan terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Dispakan.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 268

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 268 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 268 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien, serta memiliki sasaran dan strategi yang tepat maka diperlukan proses perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Tahapan perencanaan memiliki andil yang besar dalam menentukan keberhasilan serta kegagalan dari suatu kebijakan. Dengan adanya proses perencanaan maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Renstra Dispakan) merupakan dokumen perencanaan yang memuat penjabaran Visi Misi Bupati, serta tujuan, sasaran dan strategi Dispakan untuk Urusan Pangan dan Perikanan yang dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 268 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien, serta memiliki sasaran dan strategi yang tepat maka diperlukan proses perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Tahapan perencanaan memiliki andil yang besar dalam menentukan keberhasilan serta kegagalan dari suatu kebijakan. Dengan adanya proses perencanaan maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Renstra Dispakan) merupakan dokumen perencanaan yang memuat penjabaran Visi Misi Bupati, serta tujuan, sasaran dan strategi Dispakan untuk Urusan Pangan dan Perikanan yang dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 268 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien, serta memiliki sasaran dan strategi yang tepat maka diperlukan proses perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Tahapan perencanaan memiliki andil yang besar dalam menentukan keberhasilan serta kegagalan dari suatu kebijakan. Dengan adanya proses perencanaan maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Renstra Dispakan) merupakan dokumen perencanaan yang memuat penjabaran Visi Misi Bupati, serta tujuan, sasaran dan strategi Dispakan untuk Urusan Pangan dan Perikanan yang dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan

periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen stratejik, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik, yang dalam pelaksanaan penyusunan Renstra berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum utama yang mendasari penyusunan Renstra Dispakan antara lain:

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
14. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Nemeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten bandung Tahun 2013 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kab.Bandung No. 12 Th. 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bandung;
28. Peraturan Bupati No. 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dispakan tahun 2025-2029 adalah memberikan arah kebijakan ketahanan pangan dan perikanan selama rentang waktu 2025-2029 dalam kerangka pencapaian visi, misi, dan program.

1.3.2 Tujuan

1. Menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
2. Menjamin komitmen pada program, kegiatan dan subkegiatan yang sudah disepakati secara partisipatif antar semua pemangku kepentingan pembangunan daerah;
3. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar daerah, antar pusat dan daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan;
4. Memperkuat landasan penentuan program, kegiatan dan subkegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

- Bab 1 Pendahuluan

  Bab 1 menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- Bab 2 Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis PD

  Pada bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur PD, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki PD, kinerja pelayanan PD sesuai dengan tupoksinya dan kelompok sasaran layanan. Dapat ditambahkan mitra PD dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja serta kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawabnya (apabila ada). Bab ini juga memuat permasalahan-permasalahan pelayanan PD dan isu strategis.
- Bab 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

  Pada bab ini memuat: a) tujuan renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, b) sasaran renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, c) strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029, d) arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029.
- Bab 4 Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan

  Bab ini memuat uraian program, kegiatan dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui IKU PD, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui IKK.

- Bab 5 Penutup

  Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, memiliki Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, dan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Stuktur Dispakan

Berikut adalah Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 77 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja:

a. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

b. Sekretaris

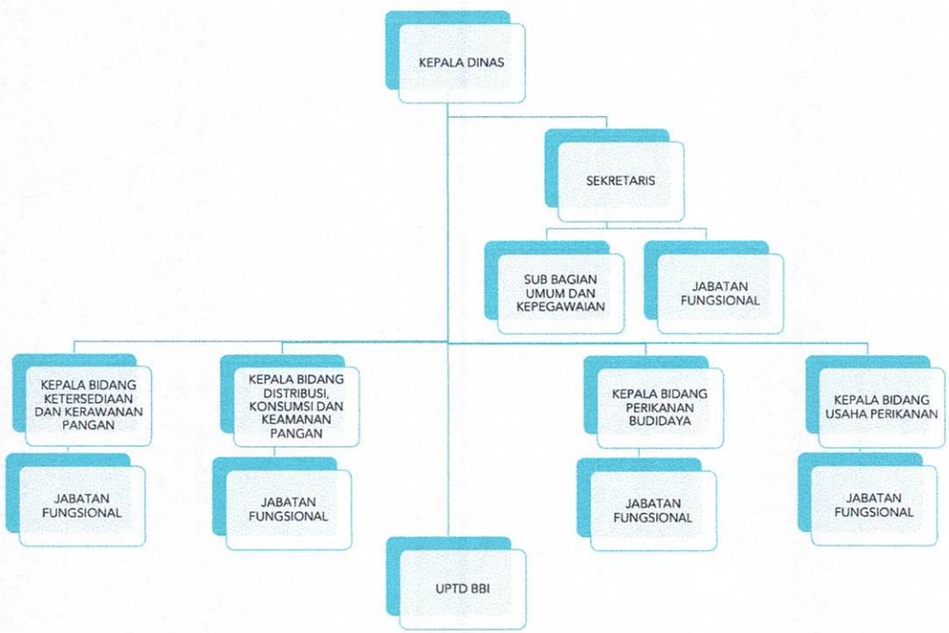
   Sekretaris membawahkan/mengkoordinasikan perencana, kepala subbagian umum dan kepegawaian, analis keuangan pusat dan daerah dan pelaksana.

c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (KKP)

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahkan/ mengkoordinasikan analis ketahanan pangan dan pelaksana.

d. Bidang Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan (DKKP)
   Bidang Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahkan/ mengkoordinasikan analis ketahanan pangan dan pelaksana.
e. Bidang Perikanan Budidaya (Kanbud)
   Bidang Perikanan Budidaya membawahkan/mengkoordinasikan analis akuakultur dan pelaksana.
f. Bidang Usaha Perikanan (UP)
   Bidang Usaha Perikanan membawahkan/mengkoordinasikan pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, analis akuakultur, pengawas perikanan dan pelaksana
g. UPTD Balai Benih Ikan
   UPTD Balai Benih Ikan membawahkan subbagian tata usaha.
h. Jabatan Fungsional

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dispakan



Sumber: LKIP, 2024

2.1.2 Sumber Daya Dispakan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung didukung oleh Sumber Daya yang terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penunjang utama keberhasilan

pembangunan. Kualifikasi untuk menetapkan komposisi kebutuhan SDM di suatu organisasi ditentukan berdasarkan faktor:

a. Tugas dan fungsi organisasi
b. Kompetensi, beban kerja dan sasaran kinerja yang ditetapkan
c. Isu strategis yang berkembang
d. Arah kebijakan dan program prioritas
e. Kemampuan dan dukungan anggaran
f. Ketersediaan personil

Berdasarkan data pemutakhiran pegawai sampai dengan Agustus 2025, Dispakan didukung oleh ASN sebanyak 47 orang, Pegawai Harian Lepas (PHL) sebanyak 24 orang, dan Tenaga Ahli 8 orang. Perkembangan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Uraian	Jenis Kelamin		SLTP	SLTA	Diploma III	S1	S2	Jumlah
		L	P						
1	Kepala	1						1	1
2	Sekretariat	6	8		4	1	7	2	14
3	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1	5				4	2	6
4	Bidang Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan	5	4	1	1		6	1	9
5	Bidang Perikanan Budidaya	2	5				4	3	7
6	Bidang Usaha Perikanan	4	3			1	4	2	7
7	UPTD Pembenihan Ikan	2	1				2	1	3
Jumlah		21	26	1	5	2	27	12	47

Sumber: simpelbkpsdm.bandungkab.go.id (2025)

Kapasitas dan kapabilitas SDM berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan merupakan modal dasar dalam peningkatan kinerja perangkat daerah. Berdasarkan data, tingkat pendidikan pegawai terbanyak adalah pendidikan S1 yaitu 27 orang. Jumlah pegawai yang menamatkan pendidikan S2 tercatat ada 12 orang dan merupakan terbanyak kedua, hingga saat ini belum ada pegawai dengan jenjang pendidikan S3, selain itu sisa jenjang pendidikan pegawai di Dispakan adalah DIII, SLTA, dan SLTP. Seiring dengan meningkatnya isu ketahanan pangan, maka jumlah dan kompetensi SDM tersebut perlu ditingkatkan, baik jumlah maupun kualitasnya guna mendukung program/kegiatan kedepannya.

Adapun resume dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan pangan dan perikanan selama 5 (lima) tahun kebelakang sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen (%)
1	2020	19.982.031.636,35	18.415.828.159,00	92.16
2	2021	27.205.416.802,00	24.730.267.738,00	90,90
3	2022	36.532.634.178,00	35.287.582.578,00	96.59
4	2023	50.884.313.861,00	48.991.732.060,00	96,28
5	2024	50.771.929.744,00	49.616.512.619,00	97,72

Sumber: LKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab.Bandung Periode 2020 hingga 2024

Melihat dinamika kondisi saat ini terutama isu ketahanan pangan yang dihadapi, ada perubahan signifikan terkait dukungan anggaran paska pandemik terutama dalam rangka penurunan angka kemiskinan, stunting dan pengendalian inflasi. Permasalahan ketahanan pangan merupakan permasalahan bersama yang dalam penyelesaiannya diperlukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas program. Diperlukan strategi yang sistematis dan komprehensif melalui upaya-upaya partisipatif dan kolaboratif baik antar instansi pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Upaya partisipatif bersama sektor swasta dapat dilakukan melalui pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk kegiatan pemberdayaan dan pengembangan sektor ketahanan pangan dan bidang perikanan.

Selain dukungan sumber daya manusia dan anggaran, Dispakan memiliki berbagai aset yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi terutama pengembangan sektor perikanan di daerah. Aset-aset tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis dan fungsinya. Aset tanah yang dimiliki digunakan untuk gedung bangunan kantor, balai benih dan pasar ikan modern. Adapun aset kendaraan terdiri dari operasional roda empat dan roda dua serta kendaraan operasional khusus diantaranya mobil laboratorium uji keamanan pangan segar asal tumbuhan. Aset peralatan dan mesin diantaranya mesin alat produksi perikanan, mesin peralatan kantor dan perlengkapan lainnya.

Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Dispakan

ASET TETAP	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
	90.427.526.969,00	82.556.839.246,00

Saldo Aset Tetap Tahun 2024 sebesar Rp 74.687.884.080,00 hasil tersebut dari Aset tetap Rp 91.087.000.907,00 dikurangi Penyusutan Rp 16.399.116.827,00. Aset tersebut terdiri dari:

Tabel 2. 4 Saldo Aset Dispakan

Aset	Saldo
Tanah	Rp. 23.933.071.000,00
Peralatan dan Mesin	Rp. 3.051.071.063,00
Gedung dan Bangunan	Rp. 45.850.800.668,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 1.800.541.849,00
Aset Tetap Lainnya	Rp. 19.710.500,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp. 32.689.000,00
Akumulasi Penyusutan	Rp. (16.399.116.827,00)
Total Aset Tetap	Rp. 74.687.884.080,00

Sumber: CALK *unaudited*, 2024

Selain sarana dan prasarana di atas salah satu sarana utama yang harus tersedia adalah sistem informasi pangan dan perikanan yang berisikan tentang data dan informasi *real-time* terkait pangan dan perikanan di Kabupaten Bandung sehingga memudahkan pimpinan daerah dan instansi lain dalam mengakses infromasi dan mengambil keputusan terkait.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dispakan

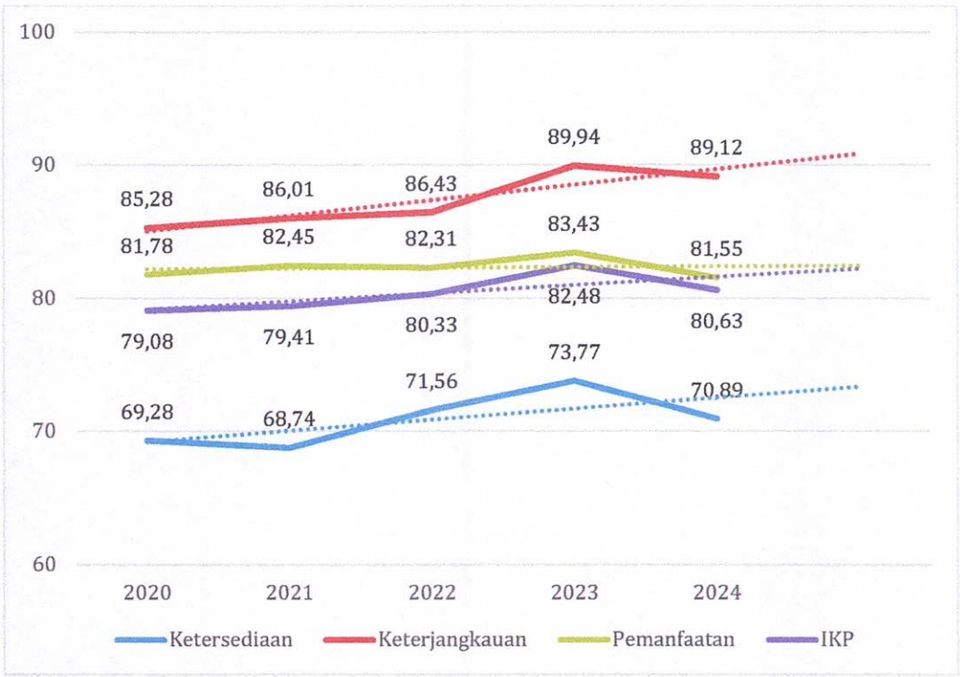
2.1.3.1 Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan

Nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan intervensi program dan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi. Merujuk gambar 2.2, kinerja ketahanan pangan Kabupaten Bandung selama periode 2020-2024 relatif meningkat berdasarkan angka capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Hasil IKP menunjukkan Kabupaten Bandung berada di peringkat ke-158 pada tahun 2020, lalu naik ke posisi 151 tahun 2024.

Capaian IKP tersebut didukung oleh tiga aspek yang membentuknya, yakni: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Ketahanan pangan akan tercapai apabila ketiga aspek tersebut menunjukkan kinerja yang baik. Diketahui, nilai IKP Kabupaten Bandung mengalami peningkatan bertahap dari tahun 2020-2023, dan terjadi penurunan kecil pada tahun 2024. Aspek keterjangkauan merupakan dimensi dengan nilai tertinggi dan pertumbuhan paling signifikan, menandakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dalam mengakses pangan. Aspek

ketersediaan masih menjadi tantangan karena nilainya paling rendah dan fluktuatif, perlu perhatian lebih dari sisi produksi dan distribusi pangan. Aspek pemanfaatan cukup stabil, menunjukkan keberhasilan dalam aspek konsumsi, gizi, dan kesehatan pangan. Namun tren secara umum masih menunjukkan peningkatan jangka panjang, mencerminkan bahwa kondisi ketahanan pangan terus membaik secara keseluruhan.

Gambar 2. 2 IKP Kabupaten Bandung 2020-2024



Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2025

A. Aspek Ketersediaan Pangan

Jika permasalahan disebabkan oleh faktor ketersediaan, maka perlu upaya-upaya peningkatan ketersediaan pangan, baik melalui peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan, maupun perbaikan pada sistem perdagangan antar wilayah serta kerjasama antardaerah. Aspek ketersediaan sangat ditopang oleh sektor pertanian. Luas lahan sawah mengalami penurunan signifikan selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir sebesar 6.932 Ha, dari 35.682 Ha pada tahun 2014 menjadi hanya 28.750 Ha pada tahun 2024, yang tentunya berdampak terhadap produksi padi (Ranwal RPJMD, 2025). Lebih rinci, tahun 2019 produksi padi tercatat 711.958 ton dan terus menurun hingga tahun 2024, dengan produksi hanya sebanyak 511.292 ton. Penurunan ini mencerminkan tekanan alih fungsi lahan yang tinggi dan menjadi perhatian penting dalam upaya perlindungan serta optimalisasi lahan pertanian di masa mendatang. Kecamatan yang paling terdampak oleh alih fungsi lahan antara lain

Pacet, Solokan Jeruk, Ibun dan Banjaran, masing-masing mengalami konversi lahan lebih dari 1.000 hektar pada periode 2022-2023. Namun demikian, meskipun produksi dan luas panen menurun, produktivitas padi mengalami peningkatan, dari 6,33 ton/ha pada tahun 2019 menjadi 6,40 ton/ha pada tahun 2024. Hal ini meunjukkan pengelolaan lahan di Kabupaten Bandung semakin efisien.

Kinerja pelayanan Dispakan yang secara langsung berkaitan dengan aspek ketersediaan dan termasuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), yaitu sejumlah bahan makanan yang disimpan/dikuasai oleh pemerintah yang berfungsi sebagai stok/cadangan dan akan digunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk konsumsi ataupun saat menghadapi keadaan darurat, juga sebagai antisipasi terjadinya gejolak harga. Selain beras, CPPD lainnya yang dikelola Kabupaten Bandung adalah ikan, daging ayam, minyak goreng, daging sapi dan telur. Penyelenggaraan CPPD tersebut adalah salah satu upaya untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi pasokan pangan dalam rangka pengendalian inflasi dan rawan gizi (stunting). Penguatan CPPD selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan (tabel 2.6). Selama dua tahun berturut-turut (2023-2024), Kabupaten Bandung meraih penghargaan kategori terbaik pertama pengelolaan CPPD tingkat Provinsi Jawa Barat. Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, Cadangan Beras Kabupaten Bandung tergolong di atas rata-rata.

Tabel 2. 5 Perbandingan Besaran Cadangan Beras Daerah, Provinsi, dan Pusat

Kabupaten Bandung	Rata-Rata Kab/Kota	Rekomendasi Provinsi	Rekomendasi Nasional
880 ton	50,09 ton*	-	327,86 ton** 1.431 ton***

Catatan: * berdasarkan data rencana pengadaan CBPD 2024 Kab/Kota se Jabar
** berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No 15/2023
*** berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 11/2018

Tabel 2. 6 Penguatan CPPD Kabupaten Bandung 2020-2024

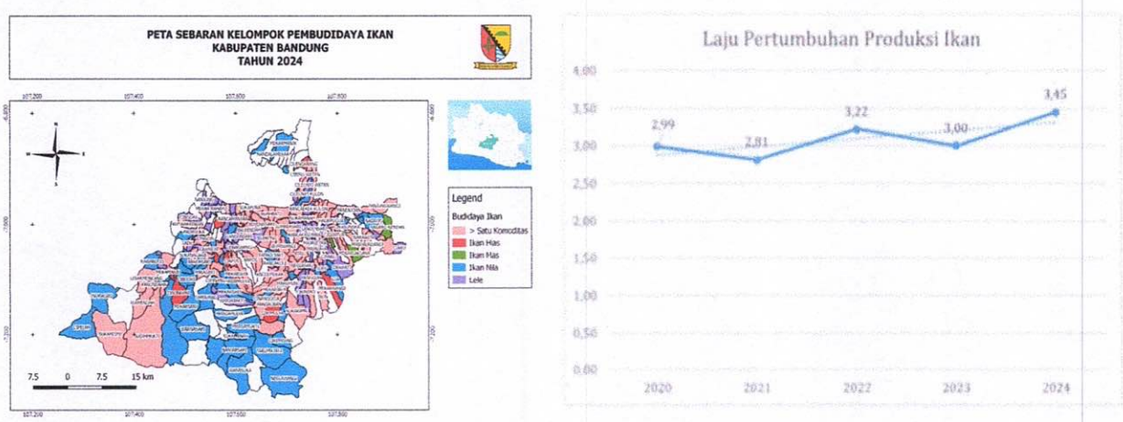
KOMODITAS	2020	2021	2022	2023	2024
Beras (Kg)	44.098	172.618	285.749	752.016	870.000
Beras Fortivit (Kg)	-	-	10.636	-	10.000
Daging Ayam (Kg)	-	-	7.612	-	-
Minyak Goreng (Liter)	-	-	46.364	36.360	185.181
Ikan (Kg)	4.938	5.000	18.401	10.201	4.000
Daging Sapi (Kg)	-	-	-	13.500	-
Anggaran (Rp)	1.745.485.500	2.921.624.402	6.650.376.800	13.502.636.700	17.158.183.800

Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2024

Pelayanan Dispakan yang juga termasuk kedalam aspek ketersediaan berikutnya adalah dari sektor perikanan. Pertumbuhan perikanan budidaya di masa mendatang merupakan bagian kunci penyediaan pasokan ikan untuk pangan nasional maupun regional, menjaga ikan agar tersedia di tingkat harga yang layak bagi konsumen yang miskin sumberdaya (Dao 2023).

Kinerja sektor perikanan sebagai penyumbang PDRB subsektor pertanian tergolong kecil. Capaian produksi sektor usaha perikanan Kabupaten Bandung hanya 26,9% dari kebutuhan ikan untuk konsumsi Kabupaten Bandung. Adapun kontribusi produksi perikanan Kabupaten Bandung terhadap total produksi perikanan Jawa Barat hanya sebesar 1,09 %. Kondisi geografis Kabupaten Bandung yang tidak memiliki laut maka potensi perikanan Kabupaten Bandung hanya pada perikanan budidaya. Mayoritas pembudi daya ikan di Kabupaten Bandung adalah pembudi daya ikan kecil dengan rata-rata luasan kolam kurang dari 500 m^2 sehingga memiliki keterbatasan terhadap teknologi budi daya ikan.

Gambar 2. 3 Capaian Produksi Perikanan Budidaya 2020-2024



Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2024

Walaupun tren laju pertumbuhannya cenderung fluktuatif, dalam kurun waktu 2020-2024 terdapat peningkatan terhadap kenaikan rata-rata laju produksi, yaitu 3,10 persen/tahun, dengan Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) rata-rata pada tahun 2024 sebesar 118,64, menunjukkan bahwa pembudi daya ikan di Kabupaten Bandung memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran (surplus).

Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk yang besar berpotensi menyerap hasil produksi perikanan. Untuk memenuhi permintaan ikan yang terus meningkat di masa mendatang, sektor ini perlu terus tumbuh dan berkembang. Investasi dalam perikanan budidaya akan mendukung peningkatan pasokan dan konsumsi ikan dalam negeri, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan gizi (Phillips et al. 2016). Sebagai wujud implementasi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan tiga prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan, salah satunya adalah pengembangan kampung-kampung budidaya perikanan tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budidaya. Kampung perikanan budidaya didefinisikan sebagai kawasan berbasis komoditas unggulan dan lokal yang bertujuan untuk mendorong budidaya ikan yang berkelanjutan dan kompetitif, serta melindungi sumber daya ikan (Putri dan Gumilar 2023). Prioritas pembangunan sentra kampung-kampung perikanan budidaya ini diharapkan dapat mendukung program ketahanan pangan dan peluang untuk penyerapan tenaga kerja bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Tabel 2. 7 Kelompok Penerima Hibah Stimulan Sarana Prasarana Budidaya dan Pengolahan Perikanan 2020-2024

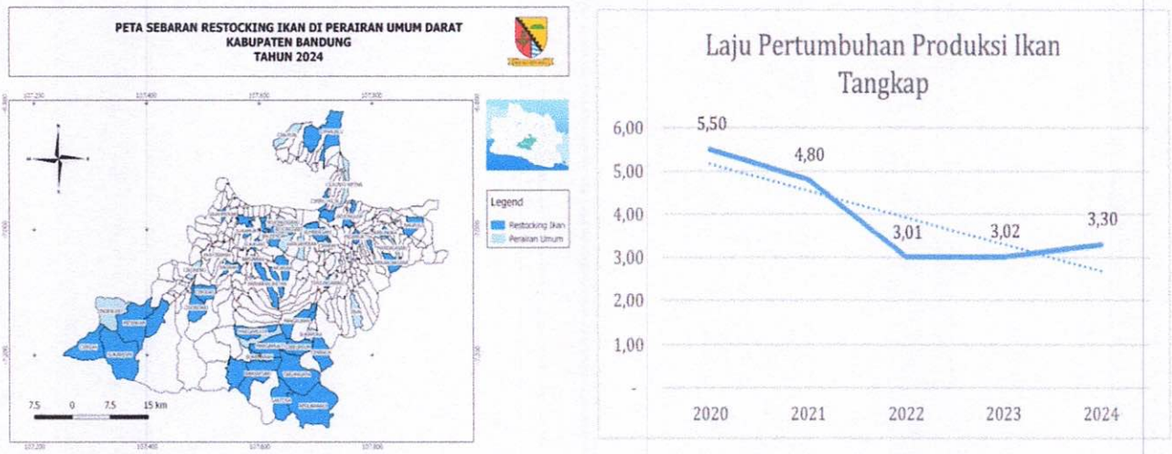
No	JENIS STIMULAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Budidaya Ikan Mas	1	15	12	9	6	43
2	Budidaya Ikan Nila	49	42	42	60	59	252
3	Budidaya Ikan Lele	38	71	89	76	91	365
4	Budidaya Minapadi	-	12	7	-	-	24
5	Budidaya Ikan Hias	12	13	25	17	20	87
6	Stimulan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya*	6	19	24	6	-	55
7	Pengembangan Pakan Mandiri	1	3	1	3	-	8
8	Stimulan Pengembangan Bioflok	3	1	-	-	-	4
9	Stimulan Sarana Prasarana Pemindangan	-	2	11	12	3	28
10	Stimulan Sarana Prasarana Pengolahan Lainnya	-	2	35	13	30	80
11	Rehab Unit Pengolahan Ikan (UPI)	1	1	-	18	-	20
	Total Kelompok Penerima	111	181	246	214	209	966

Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2025
Ket: * prasarana panen, model percontohan, rehab kolam

Sebaliknya, tren laju produksi perikanan tangkap cenderung menurun. Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Bandung berasal hanya dari Perairan Umum Darat. Penyebab utama menurunnya hasil tangkapan ikan adalah:

- Musim kemarau yang panjang sehingga ketersediaan air berkurang, suhu air meningkat dan kadar oksigen air rendah.
- Beberapa perairan/situ menghilang karena tidak dikelola atau tidak memiliki sumber air lagi.
- Pola penangkapan ikan yang merusak.

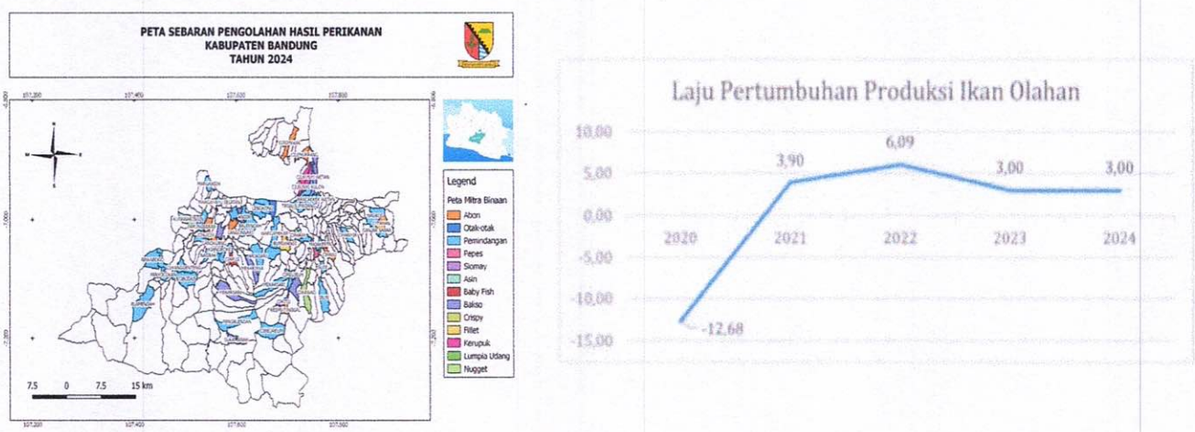
Gambar 2. 4 Capaian Produksi Perikanan Tangkap 2020-2024



Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2024

Investasi daerah yang berorientasi pada hilirisasi sumber daya alam dan peningkatan komoditas domestik yang bernilai tambah (termasuk sektor perikanan), maka Kabupaten Bandung berpeluang mendorong produksi olahan hasil perikanan. Kabupaten Bandung memiliki potensi yang cukup tinggi terutama pengolahan pemindangan, yang dapat menjadi penggerak ekonomi perdesaan dan mampu menyerap tenaga kerja. Pengolahan ikan pindang di Kabupaten Bandung sudah ditekuni masyarakat sejak puluhan tahun lalu dan harga terjangkau namun masih perlu ditingkatkan dari sisi manajemen bisnis dan persoalan sanitasi.

Gambar 2. 5 Capaian Produksi Ikan Olahan 2020-2024



Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2024

B. Aspek Keterjangkauan Pangan

Keterjangkaun pangan adalah kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses ekonomi maupun fisik. Secara ekonomi, daya beli

masyarakat masih menjadi isu utama. Inflasi pangan dan kenaikan harga barang non-pangan semakin menekan kemampuan rumah tangga untuk mengakses pangan yang memadai. Ketersediaan lapangan kerja, terutama di sektor informal, menjadi semakin penting dalam mempengaruhi daya beli rumah tangga. Kemiskinan membatasi kemampuan rumah tangga dalam memperoleh pangan yang beragam dan bergizi. Faktor alam seperti bencana dan perubahan iklim juga dapat menjadi faktor risiko yang membatasi akses pangan di beberapa wilayah.

Intervensi penanganan kerawanan pangan didasarkan pada faktor yang menjadi penyebab kerentanan pangan. Permasalahan pada akses ekonomi/daya beli yang rendah dapat diatasi dengan perbaikan sistem logistik pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyediaan lapangan kerja, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, serta jaring pengaman sosial. Keterbatasan infrastruktur dapat diatasi dengan pembangunan dan peningkatan fasilitas penunjang logistik dan distribusi pangan.

Kinerja Dispakan terkait dengan pengendalian inflasi, yakni stabilisasi pasokan dan harga pangan diantaranya adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) yakni: memberikan insentif berupa penggantian biaya distribusi kepada pemasok komoditas pangan (kios pangan). GPM memberikan kemudahan aksesibilitas pangan kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau dan wajar. Bahan pangan yang disediakan terutama adalah beras medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kegiatan GPM *gencar* dimulai sejak tahun 2023 sebagai respon pemerintah terhadap tingkat inflasi yang tinggi pada tahun sebelumnya dan gangguan cuaca dari el nino yang menyebabkan peningkatan harga beras dan cabai, menjadikan kedua komoditas tersebut sebagai penyumbang utama inflasi sepanjang tahun 2023. Pada periode April 2022 – Maret 2023, harga beras sempat tiga kali mengalami inflasi. Inflasi beras kembali cukup tinggi terjadi di Februari 2024. Kegiatan GPM berlanjut dilaksanakan secara *masif* di tahun 2024 di 31 kecamatan. Komoditas pangan yang dijual melalui FDP tersebut selain beras adalah pangan strategis lainnya yang memiliki volatilitas tinggi (penyumbang inflasi), diantaranya minyak goreng, telur ayam, daging ayam, bawang merah, bawang putih, gula pasir, terigu dan daging sapi segar.

Pada tahun 2024, Kabupaten Bandung meraih penghargaan kategori terbaik pertama Juara 1 Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk Pengendalian Inflasi. Berikut adalah hasil kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan GPM oleh Dispakan:

1. Kualitas Pangan

Hasil: 80% responden menyatakan puas dengan kualitas pangan yang disalurkan, seperti beras, minyak goreng, dan sayuran. 10% responden mengungkapkan kekhawatiran mengenai kualitas beberapa item, khususnya sayuran.

Tindakan Perbaikan: Peningkatan kontrol kualitas dan pemeriksaan rutin sebelum distribusi.

2. Harga dan Ketersediaan

   Hasil: 60% responden merasa harga pangan yang disediakan lebih terjangkau dibandingkan harga pasar umum.

   Tindakan Perbaikan: Penyesuaian estimasi kuantitas dan perencanaan yang lebih akurat untuk memastikan ketersediaan pangan sesuai dengan kebutuhan.

3. Proses Distribusi

   Hasil: 80% responden merasa puas dengan kecepatan dan efisiensi proses distribusi. Namun 10% responden mengalami antrian panjang dan keterlambatan.

   Tindakan Perbaikan: Penambahan posko distribusi dan peningkatan sistem manajemen antrian.

4. Aksesibilitas dan Lokasi

   Hasil: 75% responden merasa lokasi posko distribusi mudah dijangkau, sementara 10% merasa lokasi terlalu jauh dari tempat tinggal mereka.

   Tindakan Perbaikan: Penambahan posko di area yang lebih strategis dan peningkatan transportasi untuk akses yang lebih baik.

5. Pelayanan dan Responsivitas

   Hasil: 80% responden puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas, termasuk keramahan dan profesionalisme. 5% responden merasa ada kekurangan dalam hal responsivitas petugas terhadap pertanyaan dan keluhan.

   Tindakan Perbaikan: Pelatihan tambahan untuk petugas mengenai keterampilan komunikasi dan penanganan keluhan.

6. Informasi dan Sosialisasi

   Hasil: 70% responden merasa mendapatkan informasi yang jelas tentang program. Namun, 20% merasa kurang mendapat informasi mengenai jadwal dan syarat.

   Tindakan Perbaikan: Peningkatan upaya sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, radio, dan poster di tempat umum.

Selain itu, upaya Dispakan terkait peningkatan akses pangan lainnya adalah mengurangi beban pengeluaran untuk pangan bagi masyarakat rawan

pangan dan gizi melalui penyaluran CPPD bahan pangan untuk masyarakat di desa rawan pangan/kemiskinan ekstrim, terdampak bencana, terdampak inflasi dan Keluarga Resiko Stunting. Dalam kurun waktu tiga tahun, jumlah penyaluran CPPD mengalami peningkatan yang siginifikan.

Tabel 2. 8 Penyaluran CPPD Kabupaten Bandung 2021-2024

PENERIMA	2021	2022	2023	2024
KK rawan pangan/miskin ekstrim	8.519	18.691	18.865	7.383
Keluarga Resiko Stunting	1	1.806	9.204	7.786
Masyarakat miskin transien/ terdampak bencana	3.944	12.841	933	35.623
Masyarakat terdampak inflasi	-	2.064	10.666	85.099
Total Penerima	12.464	35.402	39.668	135.891

Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2024

Selanjutnya, Dispakan melalui program regenerasi perikanan berupaya menciptakan peluang lapangan kerja sekaligus mendorong penguatan sektor perikanan. Program ini telah berjalan selama 2 (dua) tahun, 2023-2024, yakni pemberian bantuan sarana prasarana paket usaha ikan hias. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, 91% penerima program masih melanjutkan usahanya. Permasalahan yang ditemukan diantaranya dalam hal pemasaran, terbatasnya sarana prasarana budidaya dan belum ada spesialisasi komoditas serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang teknis budidaya ikan hias. Menindaklanjuti hal tersebut, tahun 2025 Dispakan melengkapi model program ini dengan tidak hanya memberikan sarana prasarana paket usaha ikan hias melainkan juga paket usaha budidaya ikan lele di kolam terpal dan juga melengkapi dengan pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan serta pendampingan usaha budidaya.

C. Aspek Pemanfaatan Pangan

Peran pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan. Namun lebih jauh dari itu, pangan dengan kandungan gizi di dalamnya berperan nyata bagi peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, aktif dan produktif. Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan sebesar 0,71% per tahun. Laju tersebut tergolong moderat dan relatif terkendali. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bandung diperkirakan akan mencapai 3,920 juta jiwa (Ranwal RPJMD, 2025).

Tantangan yang dihadapi untuk peningkatan aspek pemanfaatan pangan adalah perilaku konsumsi yang menyebabkan pola konsumsi belum sesuai kaidah Pola Pangan Harapan (PPH), ketergantungan terhadap sumber pangan tertentu terutama beras dan terigu, masih tingginya *food lost* dan *food waste*, serta pergeseran pola konsumsi pangan kearah *fast food* dan *industrial food.* Dalam upaya pemantauan dan pembinaan konsumsi pangan, sejak tahun 2023, Dispakan menghitung skor PPH menggunakan dua sumber data: data sekunder/susenas dan data primer yaitu data dari hasil piloting survey pemantauan dan pembinaan konsumsi pangan yang dilakukan di 31 desa di 31 kecamatan (responden 10-20 KK/desa) selama 6 bulan berturut-turut, yang melibatkan unsur TP-PKK sebagai petugas survey. Berdasarkan hasil analisis, diketahui:

a) Skor PPH Kabupaten Bandung menunjukkan tren peningkatan selama tiga tahun terakhir. Antara tahun 2021-2023, skor PPH Kabupaten Bandung rata-rata meningkat 1,5%. Namun terjadi penurunan skor PPH dari tahun 2023 ke tahun 2024. Kelompok pangan yang berkontribusi terhadap penurunan ini diantaranya kelompok umbi-umbian serta kelompok sayur dan buah.
b) Ditingkat Provinsi Jawa Barat, capaian skor PPH konsumsi Kabupaten Bandung peringkat terendah. Oleh sebab itu perlu mendapat perhatian khusus, orientasi peningkatan konsumsi harus diimbangi dengan orientasi perubahan perilaku.
c) Jika dianalisis berdasarkan golongan pengeluaran, upaya peningkatan skor PPH Kabupaten Bandung terutama umbi-umbian, sayur dan buah harus pada semua kelompok golongan pengeluaran (rendah, menengah, tinggi). Untuk menekan konsumsi beras dan terigu, dapat difokuskan pada penduduk golongan pengeluaran tinggi melalui promosi pangan lokal sumber karbohidrat serta menekan *food waste.* Upaya peningkatan konsumsi protein dapat dilakukan pada penduduk dengan golongan pengeluaran rendah dan menengah. Penduduk pada golongan pengeluaran rendah mengkonsumsi energi dalam jumlah yang kurang dan tergolong pada kelompok rawan pangan. Intervensi pada kelompok golongan ini adalah program subsidi pangan bergizi, edukasi gizi atau penguatan akses terhadap pangan lokal dengan harga terjangkau.

Tabel 2. 9 Skor PPH Konsumsi Kabupaten Bandung 2020-2024

No	Kelompok Pangan	2021	2022	2023		2024	
			Analisis 2023		Analisis 2024		
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	1,2	1,0	1,4	1,1	1,8	0,9
3	Pangan Hewani	23,6	21,5	21,4	20,9	21,4	20,9
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6	Kacang-kacangan	5,7	6,7	6,9	7,5	7,1	7,7
7	Gula	1,1	0,8	1,2	0,9	1,2	0,9
8	Sayur dan Buah	19,6	22,1	24,8	25,1	25,8	24,5
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skor PPH Konsumsi		81,1*	82,2*	85,8**	85,6*	87,6**	85,1*
Skor PPH Jawa Barat			87,0		93,8		93,28

Sumber: * perhitungan berdasarkan data susenas
** perhitungan berdasarkan data hasil survey

Ketergantungan terhadap jenis pangan tertentu akan berdampak pada tingginya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menjaga agar pangan tersebut selalu tersedia. Anomali iklim dan restriksi perdagangan antar negara/wilayah dapat memperberat upaya-upaya yang harus dilakukan. Diversifikasi konsumsi pangan untuk mencapai PPH menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan pemanfaatan pangan. Diperlukan upaya-upaya yang masif dan melibatkan multisektor agar kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam dilakukan oleh masyarakat.

2.1.3.2 Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK 2020-2024

Berdasarkan tabel 2.10 diketahui bahwa capaian kinerja pelayanan Dispakan berdasarkan sembilan indikator yaitu: 1) persentase desa rentan rawan pangan yang dintervensi, 2) persentase penguatan CPPD, 3) rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal, 4) tingkat keamanan pangan segar yang diuji, 5) persentase peningkatan produksi perikanan budidaya, 6) persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, 7) persentase peningkatan produksi ikan olahan, 8) Nilai AKIP, dan 9) nilai IKM.

Tabel 2. 10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Terget Indikator Lainnya	Target Dispakan Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Persentase desa rentan rawan pangan yang diintervensi				n/a	20%	20%	20%	16%	100%	100%	100%	n/a	5	5	5
2	Persentase penguatan CPPD		IKK		n/a	8	30	25	14%	21%	52,55%	61,5%	n/a	2,63	1,75	2,46
3	Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal				n/a	1	1	1	n/a	Beras 1,05 Sayur Buah 0,73	Beras 1,09 Sayur Buah 0,74	Beras 1,02 Sayur Buah 0,94	n/a	Beras 1,05 Sayur Buah 0,73	Beras 1,09 Sayur Buah 0,74	Beras 1,02 Sayur Buah 0,94
4	Tinglat keamanan pangan segar yang diuji				n/a	85%	85%	85%	81.53%	86,20%	85,09%	98%	n/a	1,01	1,00	1,15
5	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya		IKK		3%	2,06%	2,09%	2,76%	2,94%	3,22%	3%	3,45%	1,43	1,56	1,43	1,25
6	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap		IKK		3%	3%	3%	3%	5%	3,01%	3,02%	3,30%	1,67	1,00	1,00	1,10

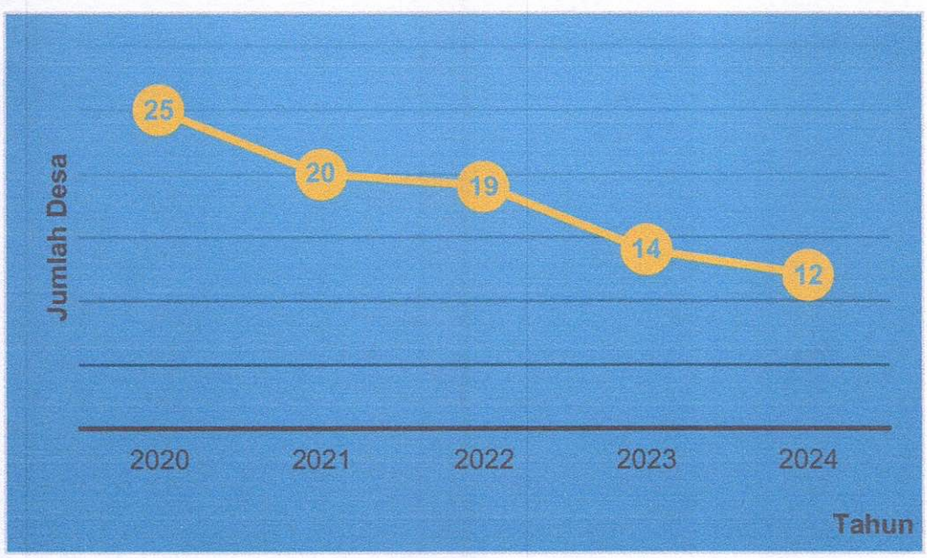
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Terget Indikator Lainnya	Target Dispakan Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Persentase peningkatan produksi ikan olahan				3%	3%	3%	3%	3,9%	6,09%	3%	3%	1,3	2,03	1,00	1,00
8	Nilai AKIP				n/a	82,35	82,50	83,00	82.31	82,70	82,85	82,90	n/a	1,00	1,00	0,99
9	Nilai IKM				n/a	84,57	84,62	84,67	82.26	81,12	84,66	83,57	n/a	0,96	1,00	0,99

Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2025

Dalam kurun waktu 2020-2024, terdapat penurunan terhadap jumlah desa potensi rentan rawan pangan; penurunan tersebut berbanding lurus dengan angka kemiskinan di Kabupaten Bandung. Tercatat, angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 6,91 menurun menjadi 6,19 tahun 2024 (BPS, 2025). Jumlah desa potensi rawan pangan tahun 2020 sebanyak 25 desa, menurun menjadi 12 desa pada tahun 2024 (FSVA, 2024). Faktor tertinggi penyebab kondisi desa berpotensi rentan rawan pangan di Kabupaten Bandung antara lain:

a) Jumlah sarana air bersih yang kurang,
b) Bertambahnya jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah,
c) Jumlah sarana prasarana penyedia pangan terbatas,
d) Tenaga kesehatan per jumlah penduduk relatif sedikit,
e) Sempitnya luas lahan baku pertanian.

Gambar 2. 6 Desa Potensi Rentan Rawan Pangan 2020-2024



Sumber: LKIP, 2024

Kedepannya, upaya peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan desa diprioritaskan pada:

a) Desa-desa prioritas 2-3 (desa potensi rentan rawan pangan) yang tersebar di Kecamatan Cikancung, Cilengkrang, Ciparay, Ciwidey, Ibun, Kertasari, Pacet, Pameungpeuk, Paseh, dan Rancaekek
b) Desa-desa yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain
c) Desa-desa yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan

d) Desa-desa pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Diketahui rata-rata capaian kinerja persentase penguatan CPPD tergolong sangat berhasil (>100%). Bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung untuk konsisten menjamin ketersediaan stok dan stabilisasi pangan jika terjadi kondisi kekurangan pangan, gangguan pasokan dan keadaan darurat lainnya. Diukur dari perencanaan jangka menengah periode sebelumnya, realisasi kinerja persentase penguatan CPPD sudah di atas 100% dari target akhir Renstra walaupun secara besaran/jumlah belum memenuhi standar rekomendasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2018. Target penguatan CPPD berbeda setiap tahunnya tergantung kemampuan keuangan daerah. Oleh sebab itu, alokasi cadangan pangan juga perlu didukung secara berjenjang dari tingkat desa. Keberadaan dan besaran CPPD mencerminkan tingkat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kerentanan pangan transien dampak dari perubahan iklim dan guncangan sosial ekonomi yang datang mendadak.

Terhadap capaian kinerja rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal tergolong berhasil (80-100%). Capaian kinerja rasio konsumsi beras, sayuran dan buah tahun 2024 tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan edukasi, pembinaan dan pemantauan terkait pola pangan B2SA cukup berhasil dilakukan. Konsumsi beras masyarakat masih di angka 88,6 kg/kap/tahun; untuk buah dan sayur sebesar 90,1,4 kg/kap/tahun. Idealnya konsumsi beras sebesar 76,8 kg/kapita/tahun; konsumsi ideal buah dan sayur 126 kg/kap/tahun. Dari perspektif perencanaan jangka menengah periode sebelumnya, realisasi kinerja rasio konsumsi beras, sayuran dan buah berturut-turut sebesar 98,03% dan 94,00% terhadap target akhir Renstra. Pola konsumsi seseorang sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sejak kecil dan kadang sangat dipengaruhi oleh suasana hati (*emotional eating*). Akibatnya, banyak masyarakat yang sekalipun sudah memiliki pengetahuan gizi yang baik, tetap sulit melakukan praktek gizi seimbang Edukasi gizi seimbang perlu diperkuat dengan materi *food preparation* supaya ibu-ibu rumah tangga dapat menyiapkan makanan B2SA secara efektif dan efisien. Konsumsi beras masyarakat Kabupaten Bandung lebih mendekati angka ideal dibandingkan konsumsi rata-rata masyarakat Jawa Barat. Sebaliknya konsumsi buah dan sayur masyarakat Kabupaten Bandung lebih rendah dibandingkan konsumsi rata-rata masyarakat Jawa Barat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas konsumsi diantaranya:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui gerakan sadar konsumsi terutama ibu rumah tangga tentang arti penting pola konsumsi pangan B2SA bagi tubuh agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.
2. Meningkatkan akses rumah tangga dan/atau perseorangan atas pangan B2SA secara fisik (program peningkatan ketahanan pangan keluarga).

Diketahui rata-rata capaian kinerja tingkat keamanan pangan segar yang diuji tergolong sangat berhasil (>100%). Realisasi kinerja konsisten di atas 85% sesuai dengan target akhir Renstra. Capaian kinerja penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan telah memenuhi target minimal syarat keamanan dan mutu pangan yaitu sebesar 85% (Provinsi) dan 90% (Nasional), yang dilakukan melalui pengawasan *pre market* dan *post market*. Tantangan dalam upaya perbaikan pengawasan keamanan pangan, antara lain:

a. Koordinasi lintas sektor/Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah secara berkala.
b. Penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawas berupa pelatihan/bimbingan teknis dan sertifikasi profesi;
c. Tersedianya data pelaku usaha Pangan Segar pada tingkat on farm atau tingkat distributor di Kabupaten Bandung sehingga dapat dijaring untuk melakukan registrasi PSAT ataupun Sertifikat Prima.
d. Tersedianya data pedagang yang menjual pangan segar di Pasar sehingga dapat ketelusuran sesuai dengan tujuan penjaminan keamanan pangan.

Untuk sektor perikanan, capaian produksi ikan masih dapat ditingkatkan. Budidaya ikan di Kolam Air Tenang (kolam tanah) dinilai masih cukup resilien terutama untuk usaha pembenihan ikan mas dan nila. *Update* data jumlah pembudi daya ikan di Kabupaten Bandung sebanyak 2.309 orang (KUSUKA, 2025), dengan luas total yang diusahakan 3.851.798 m^2 (Laporan Pelaksanaan Kegiatan DURI IKAN, 2024). Kegiatan budidaya ikan yang paling banyak dilakukan adalah budidaya ikan nila, mas, lele dan ikan hias. Produktivitas usaha pembenihan dan pembesaran pun masih dapat ditingkatkan hingga dua kali lipat melalui upaya manajemen pembenihan dan kolam untuk menekan tingkat kematian benih yang tinggi hingga mencapai 30-50%. Frekuensi kegiatan pembesaran ikan juga dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan minapadi baik sistem tumpeng sari maupun penyelang.

Selain itu guna memudahkan pembudi daya ikan melakukan konsultasi terkait perikanan, Dispakan membuka layanan Pos Perikanan Terpadu (POSKANDU) di UPTD BBI setiap hari Rabu. Dengan keterbatasan SDM penyuluh perikanan dan tersebarnya pembudi daya di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, maka keberadaan POSKANDU adalah dalam rangka

meningkatkan efisiensi kinerja dinas. Berdasarkan data responden Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) semester 1 tahun 2025, masyarakat yang memanfaatkan layanan POSKANDU sebanyak 108 orang dan terbanyak terutama pelayanan input NIB. Jika pelayanan harus dilaksanakan ke setiap kecamatan maka memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar. Jenis layanan POSKANDU antara lain:

- Pelayanan konsultasi teknologi budidaya perikanan
- Pelayanan manajemen usaha perikanan
- Pelayanan konsultasi pemasaran usaha perikanan
- Pelayanan input NIB dan KUSUKA
- Pelayanan konsultasi kesehatan ikan
- Pelayanan pengujian kualitas air

Berdasarkan capaian kinerja sektor perikanan tersebut, komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk mendorong skala ekonomi, akselerasi adopsi teknologi dalam kegiatan usaha budidaya perikanan, serta alokasi ruang yang jelas untuk pengembangan sentra budidaya dan pemasaran sangat diperlukan. Pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

2.1.3.3 Hasil Capaian SDGs 2022-2024

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDGs ke-2 tanpa kelaparan melalui penyelenggaraan program ketahanan pangan. Ruang lingkup evaluasi difokuskan pada indikator-indikator yang terkait langsung dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, antara lain:

a. Akses Pangan
   - Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) ke seluruh kecamatan sebagai upaya membantu menekan inflasi pangan.
   - Identifikasi dan pemetaan wilayah rawan pangan serta penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* – FSVA).
   - Peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pangan dari CPPD.

b. Kualitas dan Keamanan Pangan
   - Sosialisasi pola konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman).

- Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar hasil pertanian dan perikanan
- Sertifikasi keamanan pangan

c. Gizi dan Status Kesehatan

- Dukungan bahan pangan bergizi (beras fortivikasi, daging, telur dan ikan) untuk program intervensi stunting.
- Promosi konsumsi protein hewani (ikan) melalui program "Gemarikan".

d. Keberlanjutan Sistem Pangan

- Pengembangan teknologi budidaya berkelanjutan.

2.1.3.4 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Dispakan 2021-2024

Dispakan cukup berhasil menjaga capaian serapan yang tinggi, rata-rata di atas 90% dari total alokasi anggaran yang disediakan. Tingkat serapan anggaran yang mendekati 100% ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan berjalan efektif dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun terdapat tantangan teknis dan non-teknis yang terjadi. Kinerja positif yang dicapai oleh Dispakan tidak lepas dari kolaborasi yang sinergis antara berbagai pihak. Kerja sama antara masyarakat dengan dinas, serta koordinasi antar dinas, badan, dan lembaga lainnya, menjadi faktor dominan yang mendukung pelaksanaan program. Hubungan yang baik ini memungkinkan terjalinnya sinergi yang kuat, sehingga berbagai program dapat berjalan lancar dan memberikan dampak yang signifikan.

Tabel 2. 11 Hasil Capaian SDGs 2022-2024

Kode	Indikator	Definisi Operasional	Target			Realisasi			Tingkat Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.											
2.1.2 (a)	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang	Jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah di desa potensi rentan rawan pangan prioritas kedua/Total jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah	1,91	1,89	1,87	3,59	2,35	1,00	-1,68	-0,46	+0,87
2.1.2 (b)	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan Berat	Jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah di desa potensi rentan rawan pangan prioritas kesatu/Total jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.											
2.2.2.(b)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan Perkapita	Skor PPH Konsumsi	79,9	86,5	86,7	81,1	85,8	85,1	101,50%	99,19%	98,15%

Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2024

Tabel 2. 12 Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Dispakan 2021-2024

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-					
		Tahun 2021		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar															
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Nilai SAKIP; 2) Nilai IKM	82.31; 82.26	9,978,638,927	81; 84.57	11,787,455,000	81.25; 84.62	11,781,711,000	81.5; 84.67	11,631,711,000	82.7; 81.12	12,646,325,832	82.85;84.66	14,202,357,255	82.9; 83.57	14,202,357,255
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	38,652,500	100%	105,000,000	100%	105,000,000	100%	105,000,000	100%	85,954,600	100%	78,416,937	100%	78,416,937
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	26,600,000	4 dok	85,000,000	4 dok	85,000,000	4 dok	85,000,000	4 dok	66,814,800	4 dok	56,733,137	4 dok	56,733,137
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah rapat/desk terkait perencanaan dan pelaporan	4 kali	8,052,500	8 kali	15,000,000	4 laporan	15,000,000	-		47 kali	14,999,800		14,799,000		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							4 laporan	15,000,000			4 lap.		4.00 Laporan	14,799,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dok	4,000,000	6 dok	5,000,000	6 dok	5,000,000	6 dok	5,000,000	6 dok	4,140,000	6 dok	6,884,800	6 dok	6,884,800
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan														

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-					
		Tahun 2021		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah														
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	8,056,097,332	100%	9,109,091,000	100%	9,109,091,000	100%	9,109,091,000	1	9,369,166,290	100%	9,735,215,163	100%	9,735,215,163
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 OB	8,042,882,332	12 OB	9,095,871,000	12 OB	9,095,871,000	12 OB	9,095,871,000	12 OB	9,354,616,490	43 OB	9,716,095,163	43.00 Orang /bulan	9,716,095,163
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	1,995,000	1 dok	2,000,000	1 lap.	2,000,000	1 lap.	2,000,000	2 dok	1,999,800	1 dok	2,000,000	1 lap.	2,000,000
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 lap.	11,220,000	12 lap.	11,220,000	12 lap.	11,220,000	12 lap.	11,220,000	12 lap.	12,550,000	12 lap.	17,120,000	12 lap.	17,120,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penunjang kerja aparatur	100%	41,080,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	-	1	92,253,400	100%	208,620,680	100%	208,620,680
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan	0		0	-	-	-	-	-	3 stel	21,578,400	1 paket	28,343,680	1.00 Paket	28,343,680
Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah rapat koordinasi bulanan	12 kali	41,080,000	12 kali	50,000,000		50,000,000	-	-	-	-	-	180,277,000	-	-
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					12 lap.		12 lap.	100,000,000			12 lap		12 dok	180,277,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi dan	100%	640,656,971	100%	667,500,000	100%	667,500,000	100%	717,500,000	100%	520,694,116	100%	116,250,336	100%	1,116,250,336

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-					
		Tahun 2021		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	pemeliharaan perkantoran														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	19,919,790	1 paket	20,000,000	1 paket	20,000,000	1 paket	20,000,000	1 paket	19,852,350	1 paket	19,897,556	1 paket	19,897,556
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	298,074,535	2 paket	350,000,000	2 paket	350,000,000	2 paket	350,000,000	2 paket	196,614,337	2 paket	628,042,326	2 paket	628,042,326
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 jenis	77,070,396	4 jenis	60,000,000	4 jenis	60,000,000	4 jenis	60,000,000	4 jenis	59,958,695	4 jenis	47,333,952	4 jenis	47,333,952
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	16,889,500	1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	1 paket	29,993,999	1 paket	49,948,651	1 paket	49,948,651
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	99,984,750	2 paket	110,000,000	2 paket	110,000,000	2 paket	110,000,000	2 paket	98,396,053	2 paket	161,863,568	2 paket	161,863,568
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3400 eks	16,440,000	5400 eks	17,500,000	3400 eks	17,500,000	3400 eks	17,500,000	5400 eks	16,440,000	1 dok	17,340,000	1 dok.	17,340,000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	29,991,000	2 paket	30,000,000	2 paket	30,000,000	2 paket	30,000,000	2 paket	30,000,000	7 paket	10,597,050	7 paket	10,597,050
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu														
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218 HOK	82,287,000	98 HOK	50,000,000	116 lap.	50,000,000	116 lap.	100,000,000	121 HOK	69,439,681	219 lap.	181,227,233	219 lap.	181,227,233
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	176,359,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	450,000,000	100%	422,423,000	100%	339,266,645	100%	339,266,645
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-	0	200,000,000	1 paket	200,000,000	1 paket	200,000,000	1 unit	24,000,000	1 unit	123,664,645	1 unit	123,664,645

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-					
		Tahun 2021		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan														
Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	176,359,000	2 unit	400,000,000	2 unit	400,000,000		250,000,000	2 unit	398,423,000	2 unit	215,602,000	2 unit	215,602,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran	100%	742,473,723	100%	775,864,000	100%	730,120,000	100%	730,120,000	100%	1,119,580,454	100%	1,692,501,287	100%	1,692,501,287
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	140,366,139	12 bulan	250,000,000	12 bulan	250,000,000	12 bulan	250,000,000	12 bulan	255,712,550	12 bulan	221,730,777	12 lap.	221,730,777
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diservis/diperbaiki	20 unit	35,615,000	31 unit	40,000,000			-		57 unit	36,615,000				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan														
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	566,492,584	12 bulan	485,864,000		480,120,000	-		12 bulan	827,252,904	12 lap	1,470,770,510		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					204 lap.		204 lap.	480,120,000					12 lap.	1,470,770,510
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran	100%	283,319,401	100%	480,000,000	100%	520,000,000	100%	520,000,000	1	1,036,253,972	100%	1,024,400,813	100%	1,024,400,813
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 unit	30,000,000	1 unit	30,000,000	1 unit	30,000,000	1 unit	25,963,496			-	-

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-					
		Tahun 2021		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 unit	143,593,401	29 unit	250,000,000	44 unit	250,000,000	44 unit	250,000,000	29 unit	183,454,476	40 unit	318,627,973	40 unit	318,627,973
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		139,726,000			20 unit	40,000,000	20 unit	40,000,000			26 unit	49,469,840	26 unit	49,469,840
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		1 unit	200,000,000	1 unit	200,000,000	1 unit	200,000,000	1 unit	826,836,000	3 unit	656,303,000	3 unit	656,303,000
Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)											100%	7,685,394	100%	7,685,394
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											2 OB	7,685,394	2.00 Orang /Bulan	7,685,394
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan yang memiliki Lumbung Pangan	16%	1,307,659,785	20%		20%	442,500,000	20%	442,500,000	10%	5,434,807,500	21%	425,963,000	20%	268,001,226
Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lumbung pangan yang beroperasional baik	46 unit	1,307,659,785	46 unit		47 unit	442,500,000	52 unit	442,500,000	46 unit	5,434,807,500	62 unit	425,963,000	66 unit	268,001,226
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia (unit)	4 unit	1,307,659,785	4 unit	442,500,000	5 unit	442,500,000			11 unit	1,934,807,500	9 unit	425,963,000		
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur yang tersedia								100,000,000	5 unit	1,934,807,500				
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandiarian pangan yang tersedia	4 unit				5 unit	442,500,000								

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-					
		Tahun 2021		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia							5 unit	342,500,000	15 unit	3,300,000,000			8 unit	268,001,226
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan utama	AKE 98.2%; AKP 111.6%	5,791,275,732	100%	4,247,273,200	100%	6,126,274,400	100%	3,626,274,400	1	8,353,050,828	98%	15,876,276,510	89%	19,600,697,158
Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	Persentase simpul pangan di desa yang aktif	45%	599,993,732	63%	698,772,200	72%	609,795,400	81%	609,795,400	58%	686,527,655	100%	663,005,103	46%	768,925,158
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah fasilitasi Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			1 keg.	58,077,000	-				-	0				
	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (laporan)					1 lap.	58,077,000	1 lap.	58,077,000						
Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (laporan)	1 paket	69,609,432	12 lap.	71,744,000	12 lap.	71,744,000	12 lap.	71,744,000	32 lap.	134,779,700	12 lap.	38,516,000	12.00 Laporan	58,992,800
Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (dokumen)	12 lap.	98,325,000	12 lap.	170,000,000	12 dok.	170,000,000	12 dok.	170,000,000	12 lap.	161,488,000	12 lap.	138,583,800	-	-
Pengembangan Kelembagaan Dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan (unit)	9 PUPM	123,782,900	6 PUPM	121,000,000	10 unit	121,000,000	10 unit	121,000,000	6 PUPM	120,659,500	5 unit	38,752,000	5.00 Unit	244,203,000
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat Dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan (unit)	34 unit	308,276,400	30 TTI	277,951,200	15 unit	188,974,400	15 unit	188,974,400	22 TTI	269,600,455	27 TTI	447,153,303	-	-
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Stok,	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok							34 lap.						39.00 Laporan	465,729,358

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-					
		Tahun 2021		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pasokan Dan Harga Pangan Pokok Strategis	pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis														
Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan	14%	2,970,039,600	8%	1,931,199,000	30%	4,431,199,000		1,931,199,000	0	5,782,403,099	53%	13,730,701,123	61.49 %	17,657,934,550
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (laporan)	1 kali	20,580,000	12 lap.	50,000,000	12 lap.	50,000,000	12 lap.	50,000,000	12 lap.	39,253,000	12 lap.	53,852,595	-	-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (dokumen)	2 dok.	243,395,000	1 dok.	150,000,000	1 dok.	150,000,000	1 dok.	150,000,000	1 dok.	144,768,400				
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (ton)	177.6 ton	2,706,064,600	100 ton	1,731,199,000	369.2 ton	4,231,199,000	369.2 ton	1,731,199,000	296.38 ton	5,598,381,699	752.02 ton	13,676,848,528	880 ton	17,657,934,550
	Jumlah CPPD komoditas lain tersedia (daging ayam)			19.2 ton	-	19.2 ton		19.2 ton		72.38 ton	0	60.06 ton			
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal (%)	1.32 dan 0.67	2,221,242,400	1	1,617,302,000	1	1,085,280,000	1	1,085,280,000		1,884,120,074	0.92	1,482,570,284	0.96 Rasio	1,173,837,450
Penyusunan Dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (dokumen)	2 dok	99,825,000	1 dok.	200,000,000	1 dok.	200,000,000	1 dok.	50,000,000	1 dok.	49,950,000			1 dok.	24,609,000
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)	32 lok.	1,792,495,500	19 kel.	1,167,302,000	20 kel.	635,280,000	-	635,280,000	26 kel.	1,526,591,884		828,233,474	5 lap.	174,508,290
	Jumlah model pengembangan pangan pokok lokal	5 lokasi	-									6 kel			
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Dan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per	5 keg.	328,921,900	6 keg.	250,000,000	3 lap.	250,000,000	3 lap.	400,000,000	11 keg.	307,578,190	15 lap.	654,336,810	5 lap.	974,720,160

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-					
		Tahun 2021		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kapita Per Tahun (laporan)														
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan yang tertangani	16%	556,793,000	20%	400,000,000	20%	400,000,000	20%	400,000,000	0	282,147,500	100%	411,657,547	100%	541,735,310
Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	100	72,525,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100%	50,000,000	100	48,262,200	100	259,410,100	100%	46,094,500
Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (dokumen)	1 dok.	72,525,000	1	50,000,000	1 dok.	50,000,000	1 dok.	50,000,000	1	48,262,200	1	259,410,100	1 dok	46,094,500
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase KK miskin yang tertangani	37.72	484,268,000	20	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000	20	233,885,300	20	152,247,447	7.00 Unit	495,640,810
Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota (laporan)	5 lap.	87,980,000	5	150,000,000	5 lap.	150,000,000	5 lap.	150,000,000	5	146,682,800	5	94,247,447	5 lap.	268,825,010
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK miskin yang terintervensi	9897	396,288,000	12000	200,000,000	12000 KK	200,000,000	12000 KK	200,000,000	24,945	87,202,500	12.396	58,000,000	1.00 Dokuman	226,815,800
	Jumlah balita stunting yang terintervensi	2041 balita	-	6366 KK		6366 KK		6366 KK		7588 balita	0	3.141			
	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)					-		-				60 dok.		5.00 Laporan	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Tingkat keamanan pangan	81.53%	331,976,500	> 85%	250,000,000	> 85%	250,000,000	> 85%	408,077,000	> 85%	340,062,172	85.09%	724,021,098	98.00	497,476,830
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang mendapatkan sertifikasi Prima dan Rekomendasi Registrasi PSAT dan	261 produk	331,976,500	31	250,000,000	31 unit	250,000,000	31 unit	408,077,000	31	340,062,172	31	724,021,098	7.00 Unit	497,476,830

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-					
		Tahun 2021		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Packing House (kumulatif)														
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang/poktan yang dilatih			75 Orang	100,000,000		100,000,000	-	100,000,000	75 Orang	190,221,500		570,560,690	1.00 Dokumen	212,776,300
	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina (dokumen)					1 dok.		1 dok.				12 dok.		1.00 Dokuman	
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (sertifikat)								58,077,000						
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)								100,000,000						
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSAT yang diuji mutu dan keamanan pangan	31 sampel	331,976,500	31 sampel	150,000,000		150,000,000		150,000,000	165 sampel	149,840,672		153,460,408		284,700,530
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)					1 dok.		1 dok.				1 dok.		1 dok	
Urusan Pemerintahan Pilihan											35,287,582,579				
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan			6,763,923,794		5,656,722,000		3,168,184,200		3,291,334,200		8,231,188,747				

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-					
		Tahun 2021		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi ikan tangkap	5%	199,221,471	3%	175,000,000	3%	175,000,000	3%	175,000,000	0	273,675,000	3%	510,957,600	3.3%	256,405,300
Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perairan umum yang ditebar ikan	10%	172,226,600	11%	175,000,000	11%	175,000,000	10%	175,000,000	0	273,675,000	12.5%	510,957,600	12%	256,405,300
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah lokasi penebaran ikan (restocking ikan)	10 lokasi	172,226,600	10 lokasi	175,000,000	10 lokasi	175,000,000	10 lokasi	175,000,000	15 lokasi	273,675,000	14 lokasi			256,405,300
	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit)					1 unit		1 unit				3 unit		1 unit	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya	2.94%	5,580,903,500	2.06%	4,424,092,000	2.09%	2,344,287,000	3%	2,344,287,000	0	5,757,891,265	3.00%	9,910,044,814	3.40%	12,835,115,857
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha perikanan yang memiliki Nomor Izin Berusaha (kumulatif)	100%	75,622,500	5 NIB	145,000,000	100%	145,000,000	100%	145,000,000	5 NIB	132,119,300	100%	132,119,300	128%	117,426,450
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya, Lokasi, Dan/Atau Manfaat Atau Dampak Negatifnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, Dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing Dan/Atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	40 NIB	75,622,500	60 buah	145,000,000	20 buah	145,000,000	20 buah	145,000,000	66 buah	132,119,300	60 buah	83,533,500	77 buah	117,426,450

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-					
		Tahun 2021		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan bina kelompok perikanan	215 kel	2,379,053,300	178 kel	2,720,355,000	187 kel.	950,275,000	192 kel	950,275,000	178 kel	3,654,420,445	226 kel	2,967,346,700	231 kel.	2,855,111,427
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	140 kel.	2,075,232,900	152 kel.	2,366,195,000	125 kel.	596,115,000	130 kel	596,115,000	181 kel.	3,184,155,545	102 kel	2,372,882,700	164 kel.	2,650,777,227
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (kelompok)	65 kel.	179,451,400	2 keg.	179,160,000	3 kel.	179,160,000	3 kel.	179,160,000	2 keg.	231,585,100	31 kel	110,652,500	34 kel.	71,394,600
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan mendapat sosialisasi akses bantuan pembiayaan			30	75,000,000	-	75,000,000	-	75,000,000	6 kel.	61,120,000		31,407,500		35,960,800
	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (kelompok)	16 kel				20 kel.		20 kel.				20 kel		20 kel.	
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	120 orang	124,369,000	180 Orang	100,000,000	4 kel.	100,000,000	4 kel.	100,000,000	120 Orang	177,559,800	20 kel.	461,404,000	20 kel.	96,978,800
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah produksi ikan budidaya	15638.92 ton	3,126,227,700	15786	1,558,737,000	16116 ton	1,249,012,000	16560 ton	1,249,012,000		1,971,351,520	16627 ton	6,859,164,614	17201 ton	9,862,577,980
Penyediaan Data Dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	12 lap.	63,225,000	12 dok	76,327,000	12 dok.	76,327,000	12 dok.	76,327,000	1 lap.	75,790,000	12 dok	75,836,000	12 dok	75,836,500

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-					
		Tahun 2021		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	36 unit	1,462,497,700	28 unit	519,260,000	12 unit	259,535,000	12 unit	259,535,000	28 unit	698,072,640	81 unit	6,058,900,064	87 unit	8,662,215,090
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah induk ikan unggul tersedia	Induk lele 45 paket, Induk mas 613 kg, Induk nila 15 paket	1,225,405,140	Induk lele 50 paket, induk mas 800 kg, induk nila 20 paket	623,150,000	-	623,150,000		623,150,000	Induk lele 50 paket, induk mas 800 kg, induk nila 20 paket	820,835,000		540,648,500		941,492,340
	Jumlah produksi benih	28.666.760 ekor		28666760 ekor		-				28801724 ekor	0	28.823.380 ekor		28666760 ekor	
	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)											2 unit		4 unit	
Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (dokumen)	12 lap.	162,484,760	12 laporan	100,000,000	1 dok.	150,000,000	1 dok.	150,000,000	12 laporan	99,999,880	1 dok	97,777,800	1 dok	67,845,500
Pembinaan Dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan Di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan (orang)	9 unit usaha	113,255,100	10 unit usaha	240,000,000	10 unit usaha	140,000,000	10 unit usaha	140,000,000	15 unit usaha	276,654,000	32 unit usaha	86,002,250		115,188,550
				290 orang						290 orang	0	100 orang		36 orang	
Perencanaan, Dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan Di Darat	Jumlah dokumen Perencanaan, Dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Di Darat tersedia	1 dok.		0	-	-	-			-	107,735,500	0			

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-					
		Tahun 2021		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat (orang)	0		0	-	-	-			-		0			
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Pengaawan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	n/a				100%	100,000,000	100%	100,000,000	1	107,735,500	100%	89,174,600	100%	64,494,100
Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan dilaksanakan	n/a				3 keg.	100,000,000	3 keg.		2 keg.	107,735,500	2 keg.	89,174,600	1 keg.	64,494,100
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan dilaksanakan	n/a				-	100,000,000	-		2 keg.	107,735,500	2 keg.			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (dokumen)	n/a				1 dok.		1 dok.	100,000,000	1 dok.		1 dok.		1 dok.	64,494,100
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan	3.90%	983,798,823	3%	1,057,630,000	3%	548,897,200	3%	772,047,200	0	2,091,886,982	3%	7,145,694,421	3%	1,348,298,795
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah NIB pengolahan hasil perikanan diterbitkan	n/a	-	5 NIB	75,000,000	5 NIB	75,000,000	5 NIB	75,000,000	5 NIB	74,473,500	45 NIB	43,490,400	6 NIB	110,115,865

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-					
		Tahun 2021		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Data Dan Informasi Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan resiko (dokumen)	1 dok	-	1 dok	75,000,000	1 dok.	75,000,000	1 dok	75,000,000	1 dok	74,473,500	1 dok	43,490,400	2 dok	110,115,865
Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah produk perikanan yang memiliki sertifikasi SKP (kumulatif)	4 unit	405,322,923	15 produk	75,000,000	18 produk	75,000,000	21 produk	75,000,000	15 produk	74,600,000	8 produk	82,750,500	34 produk	20,033,000
Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah yang dilatih Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) dan diversifikasi nilai tambah pengolahan ikan		405,322,923	20 orang	75,000,000	20 orang	75,000,000	20 orang	75,000,000	20 orang	74,600,000	50 orang	82,750,500	34 orang	20,033,000
	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (unit usaha)	4 unit													
Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi hasil olahan perikanan	18130.97 ton	578,475,900	20855 ton	907,630,000	21064 ton	398,897,200	21274 ton	622,047,200		1,942,813,482	19812 ton	7,019,453,521	20407 ton	1,218,149,930
Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kampanye/promosi/kampanye produk perikanan	1467 orang	405,516,400	3760 orang	205,000,000	-	205,000,000		428,150,000				1,488,252,875		804,235,900

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke-					
		Tahun 2021		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (ton)					10 bumdes		10 bumdes				0.5 ton		0.6 ton	
Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi yang diberikan bagi pelaku usaha pengolahan ikan	2 keg.	172,959,500	37kel.	702,630,000	-		-	193,897,200	37kel.					413,914,030
	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (pelaku usaha)					28 poklahsar	193,897,200	28 poklahsar			897,372,100	42 poklahsar	5,531,200,646	33 poklahasar	

Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dispakan

Kelompok sasaran pelayanan Dispakan ini didasarkan pada urgensi untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, serta mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kelompok sasaran pelayanan Dispakan adalah sebagai berikut:

1) Masyarakat rentan pangan sebagai kelompok penerima manfaat bantuan pangan CPPD
2) Penerima manfaat langsung program pengembangan ketahanan pangan dan perikanan diantaranya Poktan/Gapoktan, Kelompok Wanita Tani, Pembudi Daya Ikan, Unit Pembenihan Rakyat, Pengolah dan Pemasar Ikan (POKLAHSAR), Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
3) Penerima manfaat langsung yang mendukung dalam rantai pasok pangan untuk memastikan distribusi pangan yaitu Kios Pangan
4) Penerima manfaat tidak langsung yang mendukung program pengawasan kemanaan pangan diantaranya pelaku usaha pangan, Pasar Tradisional, Pasar Modern, SPPG
5) Masyarakat

2.1.5 Mitra Dispakan dalam Pemberian Pelayanan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Pangan dan Perikanan, Dispakan menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Kolaborasi dengan mitra menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan. Mitra tersebut terdiri dari:

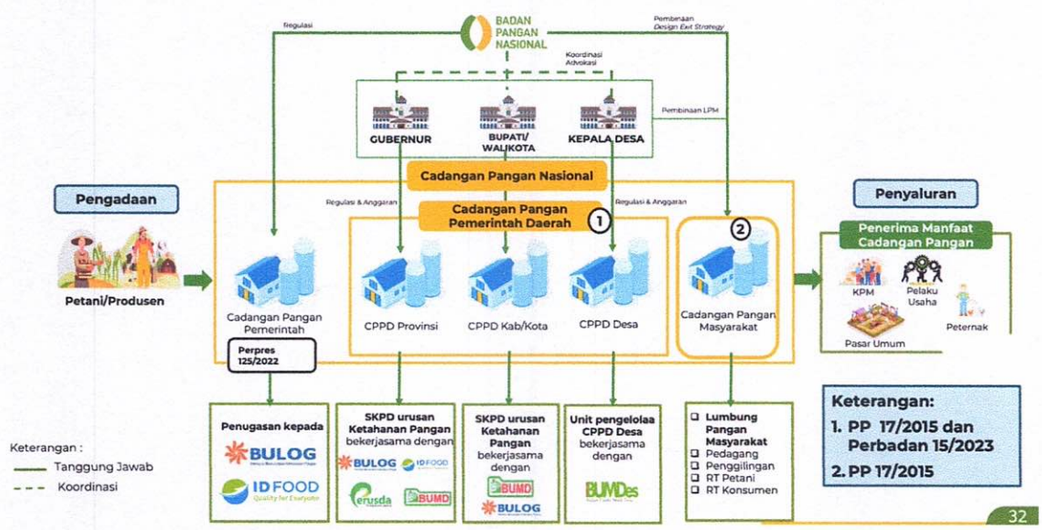
1) Petugas Penyuluh Lapangan Perikanan/Pertanian, berperan sebagai tenaga penyuluhan dan pendampingan program ketahanan pangan dan perikanan

2) Kader TPP-PKK, Desa, Kecamatan, berperan sebagai petugas survey dan agen penggerak dalam membina dan memantau konsumsi pangan melalui program piloting konsumsi pangan di 31 desa 31 kecamatan
3) Akademisi (FPIK UNPAD), terlibat dalam pendampingan optimalisasi Balai Benih Ikan
4) Dinas Sosial (Puskesos), terlibat dalam melakukan pendataan dan identifikasi data FSVA

2.1.6 Dukungan BUMD

Pengelolaan CPPD melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN/BUMD. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) mengatur bahwa BUMN dan BUMD dapat berperan dalam pengadaan dan pengelolaan CPPD. BUMN, terutama yang bergerak di bidang pangan, seperti Perum BULOG, Holding Pangan ID FOOD, dan Holding Perkebunan PTPN, dapat berperan dalam pemenuhan CPP. BUMD dan BUMDes juga dapat berperan dalam pemenuhan CPPD.

Gambar 2. 7 Dukungan BUMD untuk Pengelolaan CPPD



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dispakan

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, program prioritas pembangunan nasional salah satunya adalah swasembada pangan dengan sasaran:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan secara berkelanjutan berbasis lumbung pangan. Pengembangan lumbung pangan termasuk kedalam salah satu proyek strategis nasional lingkup pangan dan pertanian.
2. Meningkatnya kualitas konsumsi, keamanan, keterjangkauan dan penanganan kerawanan pangan; dan
3. Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan tata kelola sistem pangan serta penelitian pangan.

Secara spesifik, pelaksanaan agenda transformasi sistem pangan di Indonesia diarahkan berbasis ekoregion, dimana ekoregion daratan dan lautan menjadi *game changer* dalam mengintegrasikan pengembangan pangan lokal termasuk pangan akuatik didalamnya. Berikut adalah lima area prioritas dalam transformasi sistem pangan di Indonesia:

1. Mengakhiri kelaparan, perbaikan pola makan, promosi pangan pesisir dan laut dalam bentuk: bantuan pangan sehat dan bergizi, fortifikasi dan biofortifikasi pangan, peningkatan kapasitas UKM untuk produksi pangan sehat dan aman, promosi, pendidikan dan kampanye pangan sehat, mengurangi *food loss and waste*, riset dan inovasi serta pengembangan pangan lokal.
2. Melindungi dan memulihkann sumber daya alam dalam bentuk: penguatan kebijakan untuk pengurangan konversi lahan pertanian, promosi praktek pertanian berkelanjutan, agroekologi dan pertanian konservasi serta promosi pertanian terpadu dan model ekonomi sirkular.
3. Bisnis inklusif dalam bentuk: promosi kemitraan dan bisnis inklusif, meningkatkan rantai nilai dan perdagangan pangan yang adil, meningkatkan partisipasi pemuda dalam regenerasi petani, peningkatan kapasitas petani dalam teknologi dan inovasi, serta penguatan kelembagaan petani dalam bentuk korporasi.

4. Sistem pangan lokal dan resiliensi dalam bentuk: optimalisasi lahan pertanian marginal dan pekarangan untuk resiliensi, riset dan inovasi, promosi cadangan pangan lokal dan kearifan lokal, pertanian cerdas iklim/ *Climate-smart agriculture.*
5. Tata kelola yang inklusif dalam bentuk: logistik dan infrastruktur pangan, regionalisasi sistem pangan dalam perencanaan, kebijakan dan tata Kelola, memperkuat perencanaan sistem pangan nasional dan lokal, insentif ekonomi dan fiskal terkait pangan sehat, riset dan inovasi serta *dashboard* sistem pangan.

2.2.2 Review Renstra K/L dan Renstra Provinsi

2.2.2.1 Review Renstra Badan Pangan Nasional

Sinergi pusat (Badan Pangan Nasional) terhadap dukungan aksi dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penguatan ketahanan pangan di daerah yaitu:

1. Optimalisasi kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan
2. Peningkatan dan realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan daerah
3. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
4. Diversifikasi pangan berbasis potensi wilayah dan peningkatan konsumsi pangan B2SA
5. Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan segar, termasuk mendukung program MBG
6. Pengembangan *early warning system* (FSVA dan SKPG) sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan penanganan kerawanan pangan
7. Intervensi penanganan kerawanan pangan
8. Kolaborasi Gerakan Selamatkan Pangan untuk peningkatan ketahanan pangan dengan *stakeholder* terkait

2.2.2.2 Review Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025-2029 yakni "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan

Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". KKP terutama melaksanakan tujuh dari delapan misi Presiden dan Wakil Presiden (yakni ke-2 sampai dengan ke-8 Asta Cita), yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Berikut adalah visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih periode 2025-2029:

Visi: Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas

Adapun visi tersebut dijabarkan lebih rinci sebagai berikut:

Lebih BEDAS: memiliki arti untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.

Maju: memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Berkelanjutan: memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 5 (lima) misi untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Bandung 2025-2029 yaitu:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak. Misi ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang, baik secara kompetitif maupun religius. Selain itu, misi ini juga berkomitmen untuk menguatkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, yang bertujuan agar perempuan memiliki peran yang setara dan signifikan dalam berbagai aspek bidang kehidupan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kepemimpinan). Selain itu misi ini mendorong perlindungan bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Upaya ini dilakukan melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang menyeluruh, sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dapat bersaing

di tingkat lokal maupun global. Dalam mencapai tujuan ini, penguatan nilai-nilai religius juga ditekankan untuk membentuk individu yang memiliki integritas, etika, dan moral yang tinggi. Selain itu, misi ini juga menitikberatkan pada penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, memberikan mereka kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan.

Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk membangun ekonomi yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat pembangunan ekonomi. Termasuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi usaha kecil dan menengah, meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat dukungan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Hal ini berarti mendukung pertanian lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan bahwa produksi pangan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses yang lebih baik ke makanan yang sehat dan bergizi, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi lokal dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Misi 3: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah akan menyediakan berbagai forum dan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan secara konstruktif. Selain itu, langkah ini juga mencakup penguatan kapasitas aparatur pemerintah agar lebih responsif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi

pilar utama dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Transparansi berarti pemerintah membuka akses informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga proses dan keputusan yang diambil dapat dipahami dengan baik. Akuntabilitas berarti setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit, serta pemerintah siap memberikan penjelasan jika terjadi penyimpangan atau kesalahan. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, mendorong partisipasi yang lebih luas, dan pada akhirnya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi

Misi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian alam dan kemajuan dalam pembangunan fisik wilayah. Kualitas lingkungan hidup yang baik menjadi dasar penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, karena berkaitan langsung dengan ketersediaan udara bersih, air layak konsumsi, lahan subur, serta ekosistem yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Langkah ini tidak hanya menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi saat ini dan mendatang, tetapi juga mendukung terciptanya kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi diperlukan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan barang, serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur berarti setiap pembangunan dilakukan secara terpadu, memperhatikan tata ruang, daya dukung lingkungan, dan kebutuhan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan kombinasi antara lingkungan hidup yang terjaga dan infrastruktur yang terencana dengan baik, diharapkan

pembangunan daerah dapat berlangsung secara seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

Misi 5: Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum

Misi ini merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa ketertiban umum selalu terjaga. Program-program keamanan berbasis masyarakat seperti patroli lingkungan dan pengawasan warga, melalui upaya ini diharapkan membantu meminimalisir potensi konflik dan kriminalitas di Kabupaten Bandung. Selain itu, pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya ketertiban umum harus terus ditingkatkan. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran mereka dalam menjaga ketentraman, kita dapat membangun rasa tanggung jawab kolektif. Partisipasi aktif dari warga dalam melaporkan tindakan mencurigakan dan mendukung kebijakan keamanan akan menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adalah pondasi untuk mencapai ketentraman yang diinginkan. Pada akhirnya menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Stabilitas yang terjaga akan meningkatkan kualitas hidup, menarik investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, Kabupaten Bandung dapat menjadi tempat yang lebih baik untuk tinggal, bekerja, dan berwisata.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung dalam mendukung Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2025-2029 dengan cara berperan aktif pada misi ke-2.

2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam RTRW Kabupaten Bandung telah disebutkan

rencana polar uang wilayah. Rencana pola ruang pertanian dan perikanan termasuk dalam kawasan budi daya.

- Kawasan Pertanian
  a. Kawasan pertanian terdiri atas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
  b. Luas kawasan tanaman pangan kurang lebih 22.582 hektare berada di 30 kecamatan kecuali Kecamatan Dayeuhkolot.
  c. Luas kawasan hortikultura kurang lebih 13.482 hektare berada di 21 kecamatan.
  d. Luas kawasan perkebunan kurang lebih 39.445 hektare berada di 24 kecamatan.
  e. Luas kawasan peternakan kurang lebih 166 hektare berada di 5 kecamatan terbesar, yaitu Arjasari, Cikancung, Ciparay, Ibun, Pangalengan.
  f. Kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B seluas 17.709 hektare.
- Kawasan perikanan meliputi:
  a. Pengembangan budi daya pembesaran ikan berada di 23 kecamatan: Ibun, Majalaya, Ciparay, Pacet, Bojongsoang, Rancaekek, Paseh, Kertasari, Cicalengka, Nagreg, Cimaung, Cangkuang, Soreang, Banjaran, Pasirjambu, Cileunyi, Arjasari, Solokanjeruk, Baleendah, Margahayu, Dayeuhkolot, Kutawaringin dan Katapang.
  b. Pengembangan budi daya perikanan melalui pemanfaatan pengelolaan situ berada di 8 kecamatan: Pangalengan, Rancabali, Ibun, Kertasari, Kutawaringin, Bojongsoang, Rancaekek, Pacet.
  c. Pengembangan budi daya perikanan melalui pembenihan ikan berada di 6 kecamatan: Ibun, Majalaya, Ciparay, Pacet, Rancaekek, Paseh.
  d. Pengolahan hasil perikanan berada di 11 kecamatan: Banjaran, Cileunyi, Bojongsoang, Pacet, Majalaya, Ciparay, Rancaekek, Pasirjambu, Soreang, Baleendah, Margaasih
  e. Luas pengembangan budidaya perikanan di Kecamatan Bojongsoang kurang lebih 130 hektare.

Kawasan tersebut ditetapkan dengan tujuan melindungi dan menjamin tersedianya kawasan lahan pertanian, dan perikanan secara berkelanjutan, mewujudkan ketahanan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan pengembangan sektor perikanan.

2.2.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan Dispakan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi instrumen penting dalam menilai dampak kebijakan yang dimulai dari tahap perencanaan agar tidak merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain memastikan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *global Sustainable Development Goals* (SDGs).

Merujuk hasil KLHS, sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung sudah tidak dapat mendukung penyediaan pangan bagi penduduknya. Berdasarkan perhitungan sebesar 67,57% dari luas wilayah Kabupaten Bandung memiliki status daya dukung pangan yang sudah melampaui. Isu yang terkait dengan ketahanan pangan khususnya pemanfaatan pangan adalah tingginya kerentanan masyarakat miskin dan kualitas konsumsi pangan mengakibatkan prevelensi stunting dan malnutrisi meningkat. Rekomendasi terhadap isu tersebut, antara lain:

a. Peningkatan upaya percepatan penurunan stunting dan pencegahan stunting
b. Memberikan subsidi pangan bagi keluarga miskin untuk memastikan mereka memiliki akses ke makanan yang cukup dan bergizi
c. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan,

bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan

Hasil integrasi muatan KLHS dalam dokumen RPJMD dituangkan dalam arah kebijakan daerah, khusus untuk sasaran pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan antara lain:

a. Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, produksi pangan lokal, kerjasama antar daerah dan cadangan pangan
b. Peningkatan keterjangkauan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Ekosistem logistik pangan, simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas
c. Peningkatan pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman serta pelayanan gizi (esensial)
d. Pengembangan ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG).

2.2.6 Permasalahan Pelayanan Dispakan

Renstra disusun melalui berbagai tahapan, salah satu aspek penting dalam penyusunannya adalah identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal guna memetakan posisi organisasi dalam menghadapi permasalahan pembangunan dan dalam rangka mencapai target dari pembangunan itu sendiri. Faktor-faktor internal dan eksternal tersebut dideskripsikan melalui identifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal organisasi. Sedangkan untuk faktor eksternal dari luar organisasi dikelompokan ke dalam peluang dan ancaman.

Faktor Internal

a. Kekuatan
   1) Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia
   2) Pangan merupakan kewenangan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
   3) Sarana prasarana dan aset pertanian dan perikanan yang memadai
   4) Tersedianya Sistem Informasi Pangan dan Gizi (*Big Data* Pangan).
b. Kelemahan
   1) Pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana dan aset belum optimal

2) Pengelolaan kelembagaan pertanian dan perikanan serta kegiatan penyuluhan belum sinergis

Faktor Eksternal

a. Peluang

1) Peningkatan kebutuhan pangan untuk memenuhi Program Makan Bergizi Gratis dan Sehat
2) Sarana dan prasarana pendukung distribusi pangan yang memadai
3) Pemanfaatan teknologi *internet of things* dalam mendukung pertumbuhan sektor pangan dan perikanan.
4) Kabupaten Bandung memiliki UPTD BBI dan Pasar Ikan Modern sebagai simpul distribusi pangan.

b. Ancaman

1) Pola konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
2) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha untuk menyediakan bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
3) *Food loss and waste*
4) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
5) Berkurangnya lahan pertanian dan perikanan produktif serta *aging farmer*

Permasalahan dan isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan perikanan di 5 (lima) tahun yang akan datang. Berpijak dari informasi-informasi berikut akan dipetakan permasalahan dan isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Berikut adalah identifikasi permasalahan yang menjadi perhatian tugas dan fungsi pelayanan Dispakan.

Tabel 2. 13 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kemiskinan	Masih terdapat daerah rentan rawan pangan	Belum optimalnya kerjasama dan sinergitas intervensi antar OPD terhadap desa rentan rawan pangan
			Keberadaan lumbung desa dan lumbung pangan masyarakat belum optimal digunakan sebagai cadangan pangan masyarakat
2	Belum optimalnya kebutuhan pangan dengan gizi seimbang untuk masyarakat	Tingginya angka stunting	Kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang kaidah gizi seimbang B2SA
		Kualitas konsumsi pangan belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Alokasi pengeluaran penduduk untuk pangan masih didominasi oleh makanan dan minuman jadi yang kurang mempertimbangkan prinsip gizi seimbang, kemudian rokok, dan kelompok padi-padian.
		Belum optimalnnya pemanfaatan pangan lokal sesuai potensi daerah.	Rendahnya permintaan terhadap makanan lokal
3	Rendahnya daya saing sektor perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.	Tingginya biaya input produksi perikanan	Tingginya harga pakan dan rendahnya harga output (ikan).
		Belum optimalnya pengelolaan UPTD BBI	Manajerial belum tersistematis
		Produktivitas perikanan belum optimal	Penerapan teknologi masih rendah
		Regenerasi pembudidaya ikan	Rendahnya pendapatan sektor perikanan
		Belum optimalnya PIM (Pasar Ikan Modern) sebagai simpul distribusi pangan.	Perlunya inovasi dalam promosi dan penguatan status pengelolaan
		Potensi perikanan skala kecil dan tersebar	Belum terbangunnya Kawasan/sentra perikanan

Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2025

2.2.7 Isu Strategis

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Dalam merumuskan isu tersebut. Isu-isu strategis berikut akan menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan karena dampaknya yang signifikan bagi Dispakan di masa datang.

Aspek ketersediaan pangan

1) Menurunnya daya dukung lahan untuk produksi

2) Daya saing perikanan

Aspek Keterjangkauan pangan

3) Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok
4) Sinergitas program ketahanan pangan

Aspek pemanfaatan pangan

5) PPH konsumsi dan gizi seimbang
6) Kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan

Tabel 2. 14 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumber daya pertanian dan perkebunan termasuk perikanan cukup besar, mendukung ketahanan pangan lokal	Alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan termasuk perikanan menjadi lahan non pertanian seperti pemukiman, industri atau fasilitas umum	Ketahanan iklim seperti perubahan pola curah hujan dan daya dukung lingkungan	Krisis iklim	Kekeringan, el nino	Bencana alam	Menurunnya daya dukung lahan untuk produksi
	Harga produk pertanian tidak stabil					Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok
	Cadangan pangan masyarakat; belum optimalnya lumbung pangan masyarakat yang berfungsi sebagai stok cadangan pangan di masyarakat					
	Tingginya harga pakan dan rendahnya harga output (ikan)					Daya saing perikanan
	Regenerasi petani dan pembudi daya ikan					
	Rendahnya produktivitas perikanan budidaya	Keandalan sumber daya air				
	Belum optimalnya pengelolaan UPTD BBI					
Upaya diversifikasi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	Alokasi pengeluaran penduduk untuk pangan masih didominasi oleh makanan dan minuman olahan, kurang mempertimbangkan prinsip gizi seimbang.					Pola Pangan Harapan Konsumsi dan gizi seimbang
	Produk olahan pangan lokal tidak stabil					Kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan
	Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan					

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Masih kurangnya minat masyarakat terutama anak-anak terhadap konsumsi makan ikan					
	Belum optimalnya PIM (Pasar Ikan Modern) sebagai simpul distribusi pangan.					
Penataan dan penguatan sistem bantuan sosial untuk kelompok rentan	Tingkat kemiskinan masih di angka 5,6%-6,19%	Tingginya kerentanan masyarakat miskin dan kualitas konsumsi pangan mengakibatkan prevalensi stunting dan malnutrisi meningkat		Prevalensi stunting, wasting, dan underweight masih relatif tinggi		Sinergitas program ketahanan pangan
	Belum optimalnya kerjasama dan sinergitas intervensi antar OPD terhadap desa potensi rentan rawan pangan					
	Masih lemahnya literasi digital dan koordinasi antar sektor sehingga menghambat konsistensi penggunaan data lintas sektor dalam aplikasi digital					

Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dispakan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD maka tujuan yang hendak dicapai Dispakan dalam kurun waktu 2025-2029 adalah meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta kesejahteraan pembudi daya perikanan. Tujuan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap warga memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau, sekaligus memanfaatkan potensi sektor perikanan secara optimal dan lestari. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, Renstra Dispakan menitikberatkan pada beberapa aspek strategis, antara lain:

- Peningkatan ketersediaan, distribusi, dan stabilitas pangan di seluruh wilayah, terutama daerah rawan pangan.
- Penguatan kemandirian pangan lokal melalui pemanfaatan sumber daya dan produk pangan berbasis kearifan lokal.
- Peningkatan produksi, produktivitas, dan nilai tambah sektor perikanan baik tangkap maupun budidaya.
- Pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pangan dan perikanan, khususnya petani, dan pembudidaya kecil.
- Penguatan sistem informasi pangan dan gizi, termasuk pemantauan keamanan dan mutu pangan konsumsi.
- Pembangunan kelembagaan dan tata kelola yang responsif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

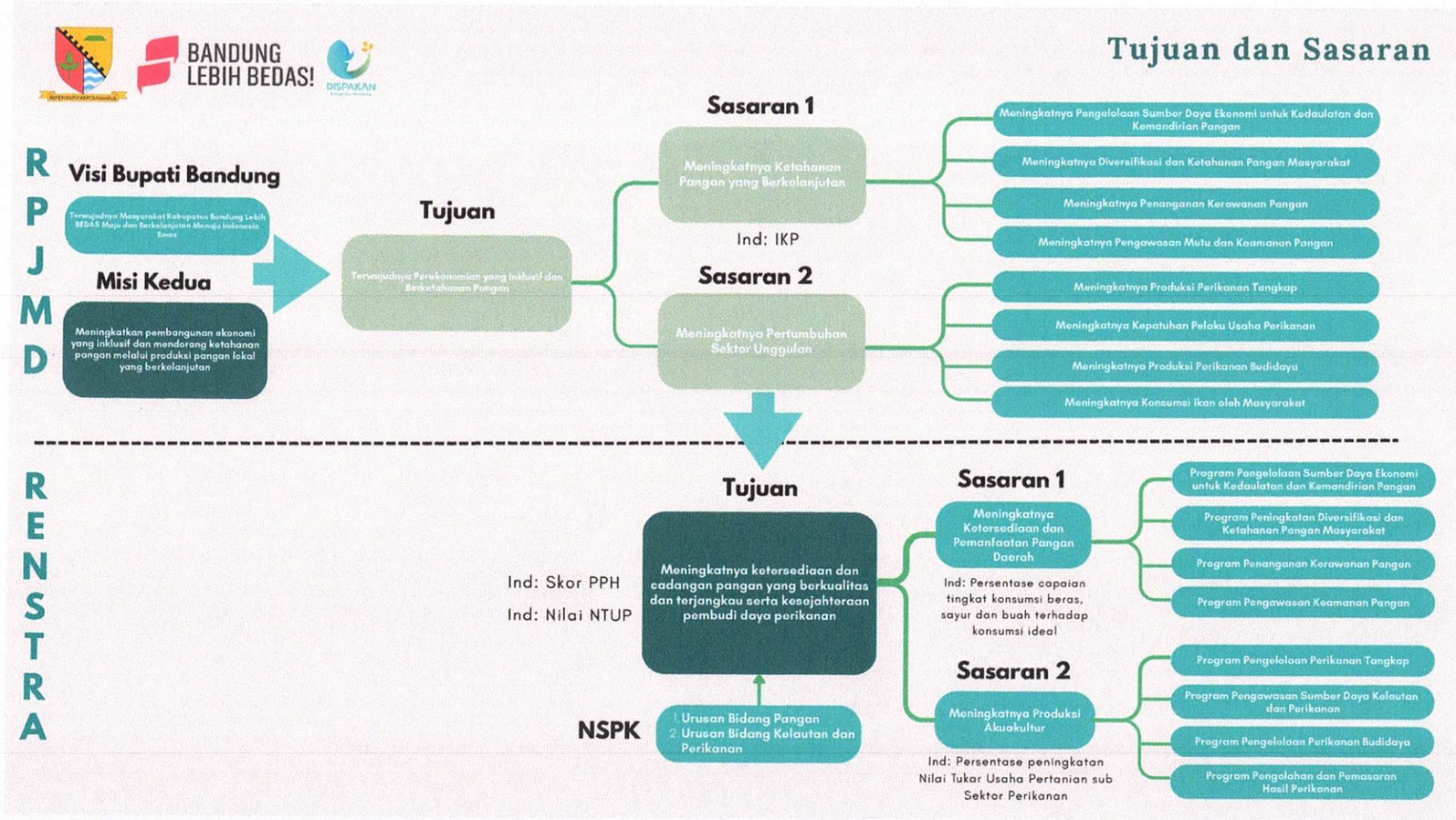
3.1.2 Sasaran

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis pembangunan daerah di sektor pangan dan perikanan, Dispakan menetapkan sejumlah sasaran strategis yang dituangkan secara terukur

dalam Renstra. Sasaran Renstra disusun dengan mempertimbangkan tantangan aktual, potensi sumber daya, dan kebutuhan masyarakat, serta mengacu pada kebijakan nasional dan daerah. Berdasarkan tugas fungsi urusan, Dispakan memiliki 2 (dua) sasaran:

1. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan pangan daerah, sasaran ini bertujuan untuk menjamin pasokan pangan yang cukup, merata, dan bergizi di seluruh wilayah, termasuk pada daerah rentan pangan dan rawan bencana.
2. Meningkatnya produksi akuakultur, sasaran ini mendukung terhadap peningkatan ekonomi pembudidaya melalui teknologi, pelatihan, dan akses pasar.

Gambar 3. 1 Keterkaitan Sasaran RPJMD dan Renstra



Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2025

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dispakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan										
Meningkatnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta kesejahteraan pembudi daya perikanan		Skor Pola Pangan Harapan	85,62-85,77	86,13-86,37	86,66-86,98	87,18-87,58	87,71-88,20	88,24 - 88,81	Hasil Perhitungan SUSENAS (BPS)
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan			Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)	100-101	100-102	100-103	100-104	100-105	100-106	Indikator ekonomi yang menggambarkan/ mengukur tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan. Nilai Tukar Usaha Perikanan ini dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima pembudiaya ikan dari hasil penjualan dengan indeks harga yang dikeluarkan untuk biaya produksi
		Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan Daerah	Persentase capaian tingkat konsumsi beras, sayur dan buah terhadap konsumsi ideal	88,73	89,25	89,84	90,37	90,90	91,50	Jumlah konsumsi beras, sayur dan buah aktual di bagi target konsumsi beras, sayur dan buah dikali 100 persen
		Meningkatnya produksi akuakultur	Persentase peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian sub Sektor Perikanan	1	1	1	1	1	1	NTUP tahun n dikurangi NTUP tahun n-1 di bagi NTUP tahun n-1 dikali 100 persen

Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2025

3.2 Strategi Dispakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dispakan Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Dispakan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan efisien. Selain itu, merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja.

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Dispakan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Pemerataan Kualitas SDM dan Infrastruktur Dalam Menunjang Pelayanan Publik yang Optimal	Peningkatan SDM dan Infratruktur yang Berkualitas dalam Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan	Pemantapan Pembangunan Daerah Berkelanjutan	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju dan Berkelanjutan
Penguatan pembinaan kelembagaan	Pengembangan kampung/sentra produksi	Keterjangkauan fisik dan ekonomi	Keterjangkauan daya beli pangan	Pemanfaatan pangan bijak
Penguatan cadangan pangan	Peningkatan produktivitas	Rantai pasok berkelanjutan		
Penguatan pengawasan keamanan pangan	Perlindungan sumberdaya perairan	Riset dan inovasi		
	Pengembangan industri pangan			
	Penguatan ketahanan pangan keluarga			

Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2025

3.3 Penyajian Lokus Dispakan

Dalam rangka mendukung tercapainya ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor perikanan, Dispakan menetapkan beberapa wilayah sebagai lokasi khusus sasaran program. Penetapan lokasi ini didasarkan pada berbagai indikator strategis, termasuk potensi sumber daya alam, tingkat kerentanan pangan, ketersediaan sarana produksi, serta tingkat partisipasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Lokasi khusus ini merupakan wilayah dengan karakteristik tertentu yang dinilai membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk pendampingan teknis, bantuan sarana prasarana, maupun program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, lokasi-lokasi tersebut juga diprioritaskan karena memiliki potensi besar dalam pengembangan subsektor pangan lokal dan perikanan budidaya maupun pengolahan.

Tabel 3. 3 Lokasi Khusus Sasaran Program

Program	Pagu Indikatif					Lokus
	2026	2027	2028	2029	2030	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	16.095.184.000	16.295.184.000	16.355.184.000	16.295.184.000	16.370.184.000	
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Fokus sentra padi pada Kecamatan Rancaekek, Ciparay, Solokanjeruk, Majalaya, Baleendah, Ciwidey, Pacet, Paseh, Banjaran, Kutawaringin
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	5.894.849.263	6.449.442.063	8.449.442.063	8.449.442.063	8.449.442.063	31 desa teras pangan di 31 kecamatan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	625.000.000	575.000.000	575.000.000	575.000.000	575.000.000	Desa Potensi Rawan Pangan hasil Kajian FSVA
Program Pengawasan Keamanan Pangan	457.025.000	565.000.000	500.000.000	525.000.000	525.000.000	10 pasar, SPPG
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kampung Perikanan Budidaya ikan lele Desa Padaulun Majalaya, Desa Wangisagara Majalaya (ikan nila). Potensi Kawasan Ikan hias: Kecamatan Ciparay, Banjaran, Cimaung, Arjasari
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.699.739.200	2.158.637.000	2.198.637.000	2.233.637.000	2.158.637.000	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	120.000.000	155.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.227.638.700	633.897.200	633.897.200	633.897.200	633.897.200	Pasirjambu (Cukanggenteng), Banjaran (Kiangroke), Bojongsoang (Lengkong, Bojongsari)

Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2025

3.4 Arah Kebijakan Renstra dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dispakan Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di sektor pangan dan perikanan, Dispakan menetapkan arah kebijakan strategis yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah serta tujuan pembangunan nasional. Arah kebijakan ini dituangkan dalam dokumen Renstra sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi selama periode lima tahun.

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Urusan Pangan Urusan Kelautan dan Perikanan	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam peningkatan investasi daerah	Penguatan pengelolaan UPTD BBI	
2			Optimalisasi pemanfaatan Pasar Ikan Modern (PIM)	
3		Pemerataan sarana prasarana dan pengelolaan sumber daya kawasan strategis pertanian dan kawasan budidaya perikanan yang terintegrasi dan sentra produksi pangan untuk mendukung kemandirian pangan	Penguatan lumbung pangan masyarakat di sentra produksi	
4			Pengembangan kampung perikanan budidaya	
5			Pengembangan pakan mandiri	
6		Peningkatan pemberian bantuan modal, bibit unggul, pupuk, benih dan pakan serta pelatihan teknologi pertanian dan budidaya ikan kepada petani dan pembudidaya ikan	Peningkatan pembinaan sertifikasi CBIB dan CPIB	
7			Penguatan kelembagaan pembudidaya ikan melalui pemberian stimulus usaha, fasilitasi skema pembiayaan serta pendampingan teknis	
8			Regenerasi Pembudidaya Ikan melalui program wira usaha baru	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9			Meningkatkan branding produk perikanan melalui promosi dan optimalisasi pemanfaatan media elektronik	
10		Penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi	Penguatan kolaborasi kelembagaan simpul pangan (PUPM/kios pangan, KWT, poktan/Gapoktan, Pembudidaya ikan)	
11			Penguatan dan peningkatan kapabilitas pengawas keamanan pangan	
12			Edukasi pola konsumsi pangan melalui pendekatan komunitas (piloting pembinaan dan pemantauan konsumsi B2SA)	
13		Pengembangan hilirisasi produk pertanian dan pengembangan ekosistem program MBG	Memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi registrasi PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK)	
14			Penataan sentra pengolahan ikan	
15			Penguatan Integrasi Hulu Hilir	
16			Peningkatan Higienitas Gudang Pangan Segar	

Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah khususnya di bidang ketahanan pangan dan perikanan, Dispakan menetapkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun secara terarah, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Setiap program dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian tahunan, serta pagu indikatif yang mencerminkan prioritas anggaran sesuai dengan skala urgensi dan dampak yang diharapkan. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan dan pijakan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dispakan. Secara umum, dukungan program dalam upaya meningkatkan indeks ketahanan pangan sebagai indikator kinerja pembangunan pangan terbagi 3 (tiga), yaitu:

1. Perbaikan Ketersediaan Pangan
   - Peningkatan produksi pangan asal tumbuhan, hewan dan ikan
   - Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan
   - Peningkatan daya beli masyarakat
   - Stabilisasi pasokan dan harga pangan
   - Pemberdayaan ekonomi masyarakat
3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan
   - Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
   - Perbaikan status gizi masyarakat

Tabel 4. 1 Rumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.09.3.25.0.00.10.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN							
- Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan - Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta kesejahteraan pembudi daya perikanan				Skor Pola Pangan Harapan		Hasil Perhitungan SUSENAS (BPS)
					Nilai Tukar Usaha Perikanan		Indikator ekonomi yang menggambarkan/ mengukur tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan. Nilai Tukar Usaha Perikanan ini dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima pembudiaya ikan dari hasil penjualan dengan indeks harga yang dikeluarkan untuk biaya produksi
		Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan Daerah			Persentase capaian tingkat konsumsi beras, sayur dan buah		Jumlah konsumsi beras, sayur dan buah aktual di bagi target konsumsi beras, sayur dan buah dikali 100 persen

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		Persentase Jumlah Cadangan Pangan	2.09.02 - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Cadangan Pangan adalah perbandingan antara jumlah cadangan pangan yang tersedia dengan jumlah kebutuhan pangan atau konsumsi pangan yang direncanakan, dinyatakan dalam bentuk persentase. Ini memberikan gambaran tentang seberapa baik cadangan pangan dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam periode waktu tertentu.
				Meningkatnya Infrastruktur Logistik Pangan	Persentase lumbung pangan yang beroperasional baik	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lumbung yang beroperasional baik dibagi jumlah lumbung di sentra padi yang aktif dikali 100 persen
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah gabungan kelompok tani di sentra padi yang mendapatkan fasilitasi lumbung

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Persentase AKE Konsumsi	2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Indikator asupan pangan tersedia cukup; Total energi yang dikonsumsi dibagi standar energi yg dibutuhkan dikali 100%
				Berkurangnya Rantai Pasok	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Total energi yang tersedia dibagi standar energi dikali 100%
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah dokumen kesepakatan pasokan pangan strategis pada HBKN
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan bibit tanaman sayur dan buah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan Gerakan Pangan Murah
				Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang menerima pembinaan dan bantuan alat pengolahan pangan untuk kelompok
				Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah kios pangan yang diberikan bantuan pangan
				Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Informasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
				Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)
				Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/ Kota
				Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD, sesuai dengan Peraturan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
							Badan Pangan Nasional (Perbadan) No. 15 Tahun 2023, adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana realisasi jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) yang ada saat ini dibandingkan dengan jumlah cadangan beras yang ditargetkan dalam perencanaan atau kebijakan yang berlaku
				Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	2.09.03.2.02.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
				Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah
				Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi	2.09.03.2.02.0008 - Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi
				Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Konsumsi Pangan B2SA	Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi beras/sayuran dan buah aktual dibagi Konsumsi beras/sayuran dan ideal kali 100 persen
				Terlaksananya Penyusunan dan	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
				Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi penerapan pola konsumsi B2SA
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah kecamatan yang dipantau dan dievaluasi konsumsi per kapita per tahun
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	2.09.04 - Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Desa dan Kelurahan Rentan Rawan Pangan dibagi Jumlah Desa Dan Kelurahan Total kali 100 persen
				Dimanfaatkannya FSVA dan SKPG	Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan
				Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta	Peta dan Analisis Ketahanan dan	2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan	Analisis dan peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	(FSVA) yang dimutakhirkan
				Meningkatnya akses pangan di daerah rentan rawan pangan	Persentase lokasi daerah rentan rawan pangan yang diintervensi	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daerah rentan rawan pangan yang diintervensi dibagi jumlah daerah rentan rawan pangan hasil FSVA tahun n-1 kali 100 persen
				Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerima cadangan pangan pemerintah daerah di lokasi rentan rawan pangan
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi gerakan selamatkan pangan
				Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah kegiatan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi
				Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	2.09.04.2.02.0008 - Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pangan untuk skala kabupaten/kota			
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	2.09.05 - Program Pengawasan Keamanan Pangan	Berdasarkan keputusan Kepala Bapanas No. 52.1 Tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan keamanan pangan segar
				Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase produk PSAT yang memiliki sertifikasi PSAT - PDUK	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk PSAT yang terbit/lolos registrasi PSAT PDUK dibagi jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi sertifikasi PSAT PDUK dikali 100 persen
				Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persentase permohonan rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota yang terlayani
				Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana uji sampel keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota
				Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan	2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan	Jumlah kegiatan edukasi tentang keamanan dan mutu

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				mutu pangan segar asal tumbuhan	dan mutu pangan segar asal tumbuhan	dan mutu pangan segar asal tumbuhan	pangan segar asal tumbuhan
				Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah kegiatan penguatan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2.09.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
					Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja tahun n+1, Renja Perubahan tahun n, RKA tahun n+1, RKAP, RKA Parsial (tentatif) dan Renstra (tentatif)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan evaluasi triwulan
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LKIP, LKPJ, LPPD, IRB, SPIP, MR
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.09.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen penatausahaan keuangan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan CALK
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan
				Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen pelaporan BMD
				Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2.09.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.09.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian	Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.09.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Kinerja Bulanan (LKB) Pegawai
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.09.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen administrasi umum operasional dan pemeliharaan perkantoran
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.09.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2.09.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	Paket Bahan/Material yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.09.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penyelenggaraan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan dokumen pengadaan BMD
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.09.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Paket unit mebel yang disediakan
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perkantoran	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan dokumen penyediaan jasa penunjang urusan
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan dokumen pemeliharaan BMD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Barang Milik Daerah			
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH / WKDH	2.09.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Ketersediaan dokumen pemenuhan operasional KDH/WKDH
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.09.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Produksi Akuakultur			Persentase Peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian sub Sektor Perikanan		NTUP tahun n dikurangi NTUP tahun n-1 di bagi NTUP tahun n-1 dikali 100 persen
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap tahun n dikurangi produksi perikanan tangkap tahun n-1 Dibagi produksi tahun n-1. kali 100 Persen
				Meningkatnya Revitalisasi di Perairan Umum	Persentase perairan umum yang terevitalisasi	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PU yang ditebar ikan dibagi total PU kali 100 persen
					Persentase perairan umum yang terindikasi terdapat ikan		Jumlah PU yang dimanfaatkan dibagi total PU yang terdapat ikan dikali 100 persen
				Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah perairan umum yang ditebar ikan
			Meningkatnya produksi perikanan budidava		Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya tahun n dikurangi produksi perikanan budidaya tahun n-1 Dibagi produksi tahun n-1. kali 100 Persen

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya legalitas pelaku usaha perikanan	Persentase pelaku usaha perikanan yang memiliki Nomor Izin Berusaha	3.25.04.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan sarpras difasilitasi NIB di bagi jumlah target kelompok binaan dikali 100 persen
				Terlayaninya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	3.25.04.2.01.0002 - Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah pelaku usaha perikanan yang terbit NIB
				Meningkatnya budi daya ikan	Produksi perikanan budi daya	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah produksi perikanan budidaya

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang mendapatkan bantuan
				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina
				Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah wirausaha baru yang memperoleh pendampingan dan pelatihan tentang budi daya ikan
				Meningkatnya sarana budi daya ikan	Persentase kebutuhan sarana budidaya ikan yang terpenuhi	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok penerima bantuan sarpras di bagi jumlah target kelompok binaan dikali 100 persen
				Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan yang tersalurkan
				Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan monitoring penyakit ikan
				Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi benih ikan hasil UPTD BBI
							Jumlah Sarana Kolam yang Beroperasional
				Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang terbina penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budi daya ikan yang baik (CBIB)
				Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan pemanfaatan air yang tersusun

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan			
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati		Jumlah Sentra/Kampung Berbasis Perikanan yang Memenuhi Standar	3.25.05 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah kumulatif sentra/kampung berbasis perikanan yang terbangun
				Persentase Pelaku Usaha yang Menerapkan Hasil Pengawasan	Persentase sentra/kampung yang menerapkan hasil pengawasan	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah RTP dalam sentra/kampung yang diawasi dibagi total RTP dalam sentra/kampung kali 100 persen
				Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran dan/atau usaha pengolahan hasil yang terawasi
				Sumber Daya Manusia Pengawasan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan	3.25.05.2.01.0009 - Pembentukan Sumber Daya Manusia	Jumlah POKMASWAS yang dibina

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Sumber daya perikanan yang dibentuk	Sumber daya perikanan yang dibentuk	Pengawasan sumber daya perikanan	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat		Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan	3.25.06 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan ikan tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi tahun n-1 kali 100 persen
					Angka Konsumsi Ikan dalam Rumah Tangga		Jumlah Ikan yang dikonsumsi (Setara Utuh Segar) dibagi jumlah penduduk Pada Pemerintah Daerah Provinsi pada periode satu tahun.
				Meningkatnya pemanfaatan peta pelaku pengolah dan pemasar perikanan	Persentase peta pelaku pengolah dan pemasar perikanan yang digunakan	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan pemasar perikanan yang dibina dibagi populasi pengolah dan pemasar perikanan yakni sebanyak 80 hasil kajian sentra pengolahan hasil perikanan thn 2024
				Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kapasitas SDM pengolah dan pemasar ikan	Persentase pengolah dan pemasar yang memiliki sertifikat kompetensi	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan pemasar perikanan yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi populasi pengolah dan pemasar perikanan yakni sebanyak 408 hasil pendataan tahun 2024-2025
				Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah kelompok pengolah dan pemasar yang mendapatkan pendampingan pengolahan
				Meningkatnya penyediaan dan penyaluran hasil olahan perikanan	Persentase Peningkatan Ketersediaan ikan	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan ikan dari hasil budidaya, berokan, pasar, dan cold storage tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi tahun n-1 kali 100 persen
				Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1	3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1	Jumlah bantuan stok ikan untuk pengolah dan pemasar ikan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pengolahan yang menerima bantuan

Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2025

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09 - Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				23.322.058.263,00		24.134.626.063,00		26.129.626.063,00		26.094.626.063,00		26.169.626.063,00	
2.09.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				16.095.184.000,00		16.295.184.000,00		16.355.184.000,00		16.295.184.000,00		16.370.184.000,00	S.2.4
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (poin)	79.6	80.1	16.095.184.000,00	80.35	16.295.184.000,00	80.60	16.355.184.000,00	80.85	16.295.184.000,00	81.1	16.370.184.000,00	
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (poin)	60.04	63.08		66.06		69.04		72.02		75		
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				128.000.000,00		128.000.000,00		128.000.000,00		128.000.000,00		128.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP (poin)	82,90	82,50	128.000.000,00	82,70	128.000.000,00	82,90	128.000.000,00	83,10	128.000.000,00	83,3	128.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	4	4	85.000.000,00	4	85.000.000,00	4	85.000.000,00	4	85.000.000,00	4	85.000.000,00	
2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	4	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00	
2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	6	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	

Bidang Urusan / Progra / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (dokumen)	0	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	
2.09.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (data)	0	91	15.000.000,00	91	15.000.000,00	91	15.000.000,00	91	15.000.000,00	91	15.000.000,00	
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.282.428.000,00		12.282.428.000,00		12.282.428.000,00		12.282.428.000,00		12.282.428.000,00	
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu (persen)	100	100	12.282.428.000,00	100	12.282.428.000,00	100	12.282.428.000,00	100	12.282.428.000,00	100	12.282.428.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.255.428.000,00		12.255.428.000,00		12.255.428.000,00		12.255.428.000,00		12.255.428.000,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/ bulan)	43	47	12.255.428.000,00	47	12.255.428.000,00	47	12.255.428.000,00	47	12.255.428.000,00	47	12.255.428.000,00	
2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	

Bidang Urusan / Progra / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (laporan)	12	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	
2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-		-		-		-		-	
Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD (persen)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
2.09.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				172.256.000,00		172.256.000,00		172.256.000,00		172.256.000,00		172.256.000,00	

Bidang Urusan / Progra / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penyelenggaraan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu (persen)	100	100	172.256.000,00	100	172.256.000,00	100	172.256.000,00	100	172.256.000,00	100	172.256.000,00	
2.09.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.09.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	12	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00	
2.09.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				32.256.000,00		32.256.000,00		32.256.000,00		32.256.000,00		32.256.000,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	0	47	32.256.000,00	47	32.256.000,00	47	32.256.000,00	47	32.256.000,00	47	32.256.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				757.500.000,00		757.500.000,00		757.500.000,00		757.500.000,00		757.500.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (persen)	100	100	757.500.000,00	100	757.500.000,00	100	757.500.000,00	100	757.500.000,00	100	757.500.000,00	
2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	
2.09.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	

Bidang Urusan / Progra / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	4	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	
2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	
2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	1	1	17.500.000,00	1	17.500.000,00	1	17.500.000,00	1	17.500.000,00	1	17.500.000,00	
2.09.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (paket)	7	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	
2.09.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	0	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	219	116	200.000.000,00	116	200.000.000,00	116	200.000.000,00	116	200.000.000,00	116	200.000.000,00	
2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				105.000.000,00		280.000.000,00		355.000.000,00		280.000.000,00		355.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah (persen)	100	100	105.000.000,00	100	280.000.000,00	100	355.000.000,00	100	280.000.000,00	100	355.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.000.000,00		-		75.000.000,00		-		75.000.000,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	0	2	75.000.000,00	0	-	2	75.000.000,00	0	-	2	75.000.000,00	
2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
2.09.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	2	0	-	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	
2.09.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-	

Bidang Urusan / Progra / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.100.000.000,00		2.100.000.000,00		2.085.000.000,00		2.100.000.000,00		2.100.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perkantoran	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100	100	2.100.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.085.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.100.000.000,00	
2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	
2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.785.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	12	1.800.000.000,00	12	1.800.000.000,00	12	1.785.000.000,00	12	1.800.000.000,00	12	1.800.000.000,00	

Bidang Urusan / Progra / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				540.000.000,00		565.000.000,00		565.000.000,00		565.000.000,00		565.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik (persen)	100	100	540.000.000,00	100	565.000.000,00	100	565.000.000,00	100	565.000.000,00	100	565.000.000,00	
2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				250.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	40	38	250.000.000,00	38	275.000.000,00	38	275.000.000,00	38	275.000.000,00	38	275.000.000,00	
2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	

Bidang Urusan / Progra / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	26	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	
2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	3	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	
2.09.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH / WKDH (persen)	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
2.09.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (orang/bulan)	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
2.09.02 - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	S.2.4
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (persen)	0	8	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya Infrastruktur Logistik Pangan	Persentase lumbung pangan yang beroperasional baik (persen)	17,8	8	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	
2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (laporan)	8	4	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	
2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-	
Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat				5.894.849.263,00		6.449.442.063,00		8.449.442.063,00		8.449.442.063,00		8.449.442.063,00	S.1.2; S.1.4; S.2.4; TPB 2
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase AKE Konsumsi (persen)	92.7	100	5.894.849.263,00	100	6.449.442.063,00	100	8.449.442.063,00	100	8.449.442.063,00	100	8.449.442.063,00	

Bidang Urusan / Progra / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				1.121.297.400,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00	
Berkurangnya Rantai Pasok	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan. (persen)	98,96	100	1.121.297.400,00	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00	
2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (laporan)	0	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	
2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				195.843.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	0	50	195.843.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Ketahanan Pangan Keluarga (keluarga)		(5 desa memiliki program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan pangan (asupan gizi)		(5 desa memiliki program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan pangan (asupan gizi)		(5 desa memiliki program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan pangan (asupan gizi)		(5 desa memiliki program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan pangan (asupan gizi)		(5 desa memiliki program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan pangan (asupan gizi)		
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00	
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	32	10	170.000.000,00	10	170.000.000,00	10	170.000.000,00	10	170.000.000,00	10	170.000.000,00	
2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				525.454.400,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (laporan)	10	9	525.454.400,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	
2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (unit)	5	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis				-		-		-		-		-	
Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (laporan)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-	
Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (dokumen)	12	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				3.773.551.863,00		4.774.442.063,00		6.774.442.063,00		6.774.442.063,00		6.774.442.063,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) (rasio)	268%	1	3.773.551.863,00	1	4.774.442.063,00	1	6.774.442.063,00	1	6.774.442.063,00	1	6.774.442.063,00	
2.09.03.2.02.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				-		-		-		-		-	
Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (dokumen)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				3.773.551.863,00		4.774.442.063,00		6.774.442.063,00		6.774.442.063,00		6.774.442.063,00	
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (ton)	880	221	3.773.551.863,00	300	4.774.442.063,00	450	6.774.442.063,00	450	6.774.442.063,00	450	6.774.442.063,00	
2.09.03.2.02.0008 - Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)				-		-		-		-		-	
Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				1.000.000.000,00		1.025.000.000,00		1.025.000.000,00		1.025.000.000,00		1.025.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Konsumsi Pangan B2SA	Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal (rasio)	Beras 1,02, Sayur Buah 0,94	1	1.000.000.000,00	1	1.025.000.000,00	1	1.025.000.000,00	1	1.025.000.000,00	1	1.025.000.000,00	
2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				-		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (dokumen)	1	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				400.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)	0	250	400.000.000,00	250	375.000.000,00	250	375.000.000,00	250	375.000.000,00	250	375.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (laporan)	31	31	600.000.000,00	31	600.000.000,00	31	600.000.000,00	31	600.000.000,00	31	600.000.000,00	
2.09.04 - Program Penanganan Kerawanan Pangan				625.000.000,00		575.000.000,00		575.000.000,00		575.000.000,00		575.000.000,00	S.1.2; S.2.4; TPB 2
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (persen)	4	11	625.000.000,00	10	575.000.000,00	9	575.000.000,00	8	575.000.000,00	7	575.000.000,00	
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				300.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Dimanfaatkannya FSVA dan SKPG	Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan (persen)	100	100	300.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				300.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (dokumen)	1	1	300.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00	
Meningkatnya akses pangan di daerah rentan rawan pangan	Persentase lokasi daerah rentan rawan pangan yang diintervensi (persen)	100	100	325.000.000,00	100	325.000.000,00	100	325.000.000,00	100	325.000.000,00	100	325.000.000,00	
2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	4	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (dokumen)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	

Bidang Urusan / Progra / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.04.2.02.0008 - Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota (dokumen)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
2.09.05 - Program Pengawasan Keamanan Pangan				457.025.000,00		565.000.000,00		500.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00	S.2.4
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (persen)	98	90	457.025.000,00	90	565.000.000,00	90	500.000.000,00	90	525.000.000,00	90	525.000.000,00	
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				457.025.000,00		565.000.000,00		500.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00	
Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase produk PSAT yang memiliki sertifikasi PSAT – PDUK (persen)	n/a	30	457.025.000,00	30	565.000.000,00	30	500.000.000,00	30	525.000.000,00	30	525.000.000,00	
2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				75.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (dokumen)	45	15	75.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				282.025.000,00		315.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00	
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (dokumen)	2	2	282.025.000,00	2	315.000.000,00	2	275.000.000,00	2	275.000.000,00	2	275.000.000,00	
2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				-		125.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00	
Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (laporan	0	0	-	1	125.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				100.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	
3.25 - Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan				7.197.377.900,00		3.097.534.200,00		3.102.534.200,00		3.137.534.200,00		3.062.534.200,00	
3.25.03 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	S.2.1
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (persen)	3.30	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Revitalisasi di Perairan Umum	Persentase perairan umum yang terevitalisasi (persen)	12	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	
	Persentase perairan umum yang terindikasi terdapat ikan (persen)	n/a	81,52		81,52		81,52		81,52		81,52		
3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit)	12	9	150.000.000,00	9	150.000.000,00	9	150.000.000,00	9	150.000.000,00	9	150.000.000,00	
3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				5.699.739.200,00		2.158.637.000,00		2.198.637.000,00		2.233.637.000,00		2.158.637.000,00	S.2.1; S.2.4
Meningkatnya produksi perikanan budidava	Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (persen)	3.45	3	5.699.739.200,00	3	2.158.637.000,00	3	2.198.637.000,00	3	2.233.637.000,00	3	2.158.637.000,00	
3.25.04.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya legalitas pelaku usaha perikanan	Persentase pelaku usaha perikanan yang memiliki Nomor Izin Berusaha (persen)	n/a	14,5	100.000.000,00	14,5	100.000.000,00	14,5	100.000.000,00	14,5	100.000.000,00	14,5	100.000.000,00	
3.25.04.2.01.0002 - Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlayaninya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan (rekomendasi)	77	70	100.000.000,00	70	100.000.000,00	70	100.000.000,00	70	100.000.000,00	70	100.000.000,00	
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				3.407.313.000,00		968.637.000,00		1.008.637.000,00		1.043.637.000,00		1.068.637.000,00	
Meningkatnya budi daya ikan	Produksi perikanan budi daya (ton)	17201	17521	3.407.313.000,00	18046,63	968.637.000,00	18588,03	1.008.637.000,00	19145,7	1.043.637.000,00	19720,1	1.068.637.000,00	
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				1.996.463.000,00		474.810.000,00		474.810.000,00		474.810.000,00		474.810.000,00	
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	164	75	1.996.463.000,00	50	474.810.000,00	50	474.810.000,00	50	474.810.000,00	50	474.810.000,00	

Bidang Urusan / Progra / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil				227.350.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (kelompok)	34	20	227.350.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	
3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				1.183.500.000,00		393.827.000,00		433.827.000,00		468.827.000,00		493.827.000,00	
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	15	50	1.183.500.000,00	20	393.827.000,00	22	433.827.000,00	24	468.827.000,00	26	493.827.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				2.192.426.200,00		1.090.000.000,00		1.090.000.000,00		1.090.000.000,00		990.000.000,00	
Meningkatnya sarana budi daya ikan	Persentase kebutuhan sarana budidaya ikan yang terpenuhi (persen)	n/a	100	2.192.426.200,00	100	1.090.000.000,00	100	1.090.000.000,00	100	1.090.000.000,00	100	990.000.000,00	
3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				76.327.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	1	1	76.327.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.401.099.200,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	20	25	1.401.099.200,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (dokumen)	12	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				325.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (ekor)	29209.36	25366	325.000.000,00	26380.66	350.000.000,00	27435.88	350.000.000,00	28807.67	350.000.000,00	30248.06	350.000.000,00	
3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (unit)	37	20	140.000.000,00	20	140.000.000,00	20	140.000.000,00	20	140.000.000,00	20	140.000.000,00	
3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		-	
Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (unit)	0	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	0	-	
3.25.05 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				120.000.000,00		155.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	S.2.1
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Jumlah Sentra/Kampung Berbasis Perikanan yang Memenuhi Standar (sentra/kampung)	1	2	120.000.000,00	3	155.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				120.000.000,00		155.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	
Persentase Pelaku Usaha yang Menerapkan Hasil Pengawasan	Persentase sentra/kampung yang menerapkan hasil pengawasan (persen)	n/a	20	120.000.000,00	20	155.000.000,00	20	120.000.000,00	20	120.000.000,00	20	120.000.000,00	
3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				35.000.000,00		85.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (pelaku usaha)	0	18	35.000.000,00	18	85.000.000,00	18	50.000.000,00	18	50.000.000,00	18	50.000.000,00	
3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	

Bidang Urusan / Progra / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (pelaku usaha)	0	16	35.000.000,00	16	35.000.000,00	16	35.000.000,00	16	35.000.000,00	16	35.000.000,00	
3.25.05.2.01.0009 - Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan				50.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (orang)	13	9	50.000.000,00	9	35.000.000,00	9	35.000.000,00	9	35.000.000,00	9	35.000.000,00	
3.25.06 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				1.227.638.700,00		633.897.200,00		633.897.200,00		633.897.200,00		633.897.200,00	S.2.1
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan (persen)	0	3	1.227.638.700,00	3	633.897.200,00	3	633.897.200,00	3	633.897.200,00	3	633.897.200,00	
	Angka Konsumsi Ikan dalam Rumah Tangga (kg/kap/tahun)	16.9	14.45		14.96		15.48		16.02		16.58		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan peta pelaku pengolah dan pemasar perikanan	Persentase peta pelaku pengolah dan pemasar perikanan yang digunakan (persen)	25	20	75.000.000,00	20	75.000.000,00	20	75.000.000,00	20	75.000.000,00	20	75.000.000,00	
3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (dokumen)	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kapasitas SDM pengolah dan pemasar ikan	Persentase pengolah dan pemasar yang memiliki sertifikat kompetensi (persen)	n/a	7,4	75.000.000,00	7,4	75.000.000,00	7,4	75.000.000,00	7,4	75.000.000,00	7,4	75.000.000,00	
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (unit usaha)	34	30	75.000.000,00	30	75.000.000,00	30	75.000.000,00	30	75.000.000,00	30	75.000.000,00	

Bidang Urusan / Progra / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				1.077.638.700,00		483.897.200,00		483.897.200,00		483.897.200,00		483.897.200,00	
Meningkatnya penyediaan dan penyaluran hasil olahan perikanan	Persentase Peningkatan Ketersediaan ikan (persen)	n/a	3	1.077.638.700,00	3	483.897.200,00	3	483.897.200,00	3	483.897.200,00	3	483.897.200,00	
3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				613.797.200,00		333.897.200,00		333.897.200,00		333.897.200,00		333.897.200,00	
Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (ton)	0	0.8	613.797.200,00	0.8	333.897.200,00	0.8	333.897.200,00	0.8	333.897.200,00	0.8	333.897.200,00	
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				463.841.500,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (pelaku usaha)	33	5	463.841.500,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	

Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2025

Ket:

S 1.2 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
S 1.4 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat
S 2.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan
S 2.4 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan
TPB 2 = Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Tanpa Kelaparan

4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4. 3 Program, Kegiatan/Subkegiatan Prioritas

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	2.09.02 - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	R25
2.	2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	R25
			2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
			2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	PN2; R25
			2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	PN2
			2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
			2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	R25
			2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	R9
			2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	R9
3.	2.09.04 - Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	PN2
			2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	PN2
			2.09.04.2.01.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	PN2
			2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	PN2

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.	2.09.05 - Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	PN2
			2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
			2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
5.	3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidava	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	R22
			3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	R20
			3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	R20
			3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	R20

Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2025

PN 2 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Astacita: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara yang Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Eknomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

R 9 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi: Menurunkan angka stunting (*New Zero Stunting*) & Peningkatan gizi anak

R 20 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi: Mencetak Wirausaha Baru dan Aktivasi Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif (Ekraf)

R 25 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi: Meningkatakan Ketahanan Pangan Berbasis Potensi Lokal Dan Optimalisasi Lahan Sawah Yang Dilindungi (LSD) dengan dikuatkan melalui Perdes (Peraturan Desa) menjadi sawah abadi

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dispakan Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Indikator kinerja Dispakan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta Indikator Kinerja Daerah ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	85,1	85,62-85,77	86,13-86,37	86,66-86,98	87,18-87,58	87,71-88,20	88,24-88,81	Hasil Perhitungan SUSENAS (BPS)
2.	Nilai NTUP	poin	118,64	100-101	100-102	100-103	100-104	100-105	100-106	Indikator ekonomi yang menggambarkan/ mengukur tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan. Nilai Tukar Usaha Perikanan ini dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima pembudiaya ikan dari hasil penjualan dengan indeks harga yang dikeluarkan untuk biaya produksi

Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2025

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat ukur utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan strategis Dispakan. Penetapan IKK menjadi bagian penting dalam sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, sekaligus menjadi dasar evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. IKK disusun secara terukur, spesifik, dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra Dinas. Setiap indikator dirancang untuk mencerminkan output maupun outcome dari intervensi kebijakan di bidang ketahanan pangan dan perikanan. Selain itu, IKK juga mengacu pada standar nasional dan regulasi perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Status	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.09 - Urusan Pemerintahan Bidang Pangan										
	Skor Pola Pangan Harapan	positif	Nilai	85,1	85,62-85,77	86,13-86,37	86,66-86,98	87,18-87,58	87,71-88,20	88,24-88,81	Hasil Perhitungan SUSENAS (BPS)
2.	3.25 - Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan										
	Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)	positif	Poin	118,64	100-101	100-102	100-103	100-104	100-105	100-106	Indikator ekonomi yang menggambarkan/ mengukur tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan. Nilai Tukar Usaha Perikanan ini dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima pembudiaya ikan dari hasil penjualan dengan indeks harga yang dikeluarkan untuk biaya produksi

Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2025

4.5 Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) merupakan komitmen global yang diadopsi oleh negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Salah satu tujuan utama dalam SDGs adalah *Goal* 2: Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*), yang bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Dalam konteks nasional dan daerah, pencapaian tujuan ini menjadi tanggung jawab bersama,

termasuk peran strategis Dispakan. Berbagai program dan kebijakan difokuskan untuk:

- Meningkatkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi sepanjang waktu.
- Mendorong pola konsumsi pangan yang sehat, beragam, dan berbasis sumber daya lokal.
- Mengurangi kerawanan pangan dan gizi buruk, khususnya pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia.

Melalui pendekatan terpadu antara sektor pertanian, perikanan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap individu memiliki hak atas pangan yang layak. Dispakan secara aktif menjalankan program seperti penguatan cadangan pangan masyarakat, diversifikasi pangan, promosi konsumsi ikan, hingga penguatan sistem distribusi dan logistik pangan. Upaya untuk mencapai SDGs Tanpa Kelaparan juga mencakup kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pencapaian tujuan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam sektor pangan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Tabel 4. 6 Indikator dan Target Pelaksanaan TPB/SDGs 2025-2029

Kode	Tujuan/ *Goals*	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan)	Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1.2*		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat. berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Persen	1,85	1,84	1,81	1,79	1,77	1,75	
2.2.2 (c)		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	poin	85,62-85,77	86,13-86,37	86,66-86,98	87,18-87,58	87,71-88,20	88,24-88,81	

Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2025

4.6 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Salah satu tema pembangunan pada RPJMD 2025-2029 adalah ketahanan pangan. Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung menginisiasi pendekatan Simpul Pangan Lokal Berbasis Komunitas yang mengintegrasikan proses produksi, distribusi, dan konsumsi ke dalam suatu ekosistem pangan yang inklusif serta berkelanjutan. Simpul pangan menjadi bagian dari upaya memperpendek rantai pasokan, memperkuat distribusi pangan lokal, memperbaiki ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat desa, sekaligus meningkatkan pemberdayaan petani dan kelompok produsen lokal.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam konteks Simpul Pangan di Kabupaten Bandung:

1. Jumlah kios pangan yang aktif belum tersebar secara merata di desa-desa, diketahui jumlah kios pangan yang aktif sebanyak 15 buah.
2. Regulasi pelaksana belum lengkap: Perda Ketahanan Pangan dan Perikanan sudah ada, tetapi Peraturan Bupati (Perbup) sebagai regulasi turunan, terutama terkait keamanan pangan dan cadangan pangan pemerintah desa, belum terbentuk. Hal ini menghambat pelaksanaan operasional dan pengawasan di simpul pangan.
3. Distribusi pangan yang belum merata: terutama ke wilayah desa terpencil atau yang memiliki akses geografis sulit. Hal ini bisa mengakibatkan ketersediaan pangan lokal yang relatif tinggi di daerah produksi, namun keterjangkauan untuk konsumen desa atau area jauh rendah.
4. Kesadaran dan perilaku konsumen: konsumsi pangan lokal, pola makan bergizi, pemilihan produk aman, dan dukungan terhadap simpul lokal terkadang masih rendah atau belum merata.
5. Sarana dan infrastuktur fisik: sarana distribusi, penyimpanan, transportasi, gudang lokal, fasilitas pengolahan/pengemasan lokal yang memadai.
6. Data dan monitoring: data simpul pangan, konsumsi pangan lokal, distribusi, mutu, keamanan, keberadaan simpul yang aktif perlu dibangun dan dipantau secara reguler.

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari dukungan Dispakan terhadap Simpul Pangan ini adalah:

1. Memperluas kapasitas cakupan simpul pangan yang aktif, sehingga hampir semua desa/kelurahan terjangkau.
2. Meningkatkan akses distribusi pangan lokal dari produsen ke konsumen melalui simpul pangan, sehingga pangan lokal lebih mudah dijangkau oleh masyarakat desa dengan harga yang wajar.
3. Meningkatkan kapasitas produsen dan pengelola simpul pangan dalam pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran produk pangan lokal.
4. Membantu pemanfaatan pangan lokal di simpul pangan untuk konsumsi bergizi dan meningkatkan pola makan lokal.

5. Mendorong peningkatan konsumsi pangan lokal dan pola makan bergizi di masyarakat desa melalui edukasi, penyuluhan, dan dukungan program pelengkap.

Critical Success Factor (CSF) atau faktor penting yang harus ada agar tujuan tersebut dapat tercapai:

1. Petunjuk Teknis atau operasional pelaksanaan yang jelas dan kuat.
2. Anggaran memadai untuk mendukung pembentukan, pemeliharaan, dan operasional simpul pangan.
3. Partisipasi pemangku kepentingan lokal: petani, kelompok tani, koperasi, kios pangan, masyarakat desa, koperasi konsumsi, serta sektor swasta dan NGO.
4. Kapasitas teknis: penyuluh, pengawas keamanan pangan, pengelola simpul pangan, petani/pembudidaya harus memiliki keterampilan produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, pemasaran.
5. Infrastruktur pendukung: fasilitas fisik simpul pangan termasuk kios pangan, gudang/persediaan, sarana transportasi, *cold-storage* jika perlu, fasilitas pengolahan/pengemasan.
6. Data, Monitoring & Evaluasi: sistem informasi simpul pangan, data keterjangkauan, mutu, aktivitas simpul, serta indikator kinerja yang jelas dan diukur secara rutin.
7. Kemitraan dan kolaborasi antar sektor: Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, desa, lembaga keuangan, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat. Kesadaran dan perilaku konsumen terhadap pangan lokal, keamanan pangan, serta kebiasaan membeli di simpul pangan lokal.

Tabel 4. 7 *Crosscutting* Program Tematik Pembangunan (Penguatan Simpul Pangan)

NO	Rencana Aksi	Lokasi	Program	TAHUN RENCANA AKSI					Mitra OPD
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	Lumbung Pangan Masyarakat	Fokus sentra padi pada Kecamatan Rancaekek, Ciparay, Solokanjeruk, Majalaya, Baleendah, Ciwidey, Pacet, Paseh, Banjaran, Kutawaringin	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Pembinaan untuk penguatan kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat melalui bimbingan teknis (bimtek) dan pendampingan	Pelatihan kewirausahaan dan pendampingan Lumbung Pangan Masyarakat	Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat dan pendampingan sebagai instrumen untuk menstimulasi pengembangan usaha di Lumbung Pangan Masyarakat	Pelatihan pengembangan skala dan kapasitas usaha Lumbung Pangan Masyarakat dan pendampingan	Pembinaan untuk eksistensi Lumbung Pangan Masyarakat melalui bimbingan teknis (bimtek) dan pendampingan	Gapoktan, Poktan, Badan BUMDES, Kecamatan, Desa, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung
2	Penguatan Kios Pangan	Kecamatan ciwidey, pasirjambu, soreang, cimaung, cangkuang, pameungpeuk, baleendah, ciparay, pacet, solokanjeruk, rancaekek, cikancung, cimenyan	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penambahan fasilitas kios pangan yang menunjang seperti freezer, rak display, neon box, alat hitung, timbangan	Peningkatan produktivitas penjualan bahan pangan pokok yang lebih beragam	inovasi dengan aplikasi barang masuk dan barang keluar, sistem pembayaran, dan layanan pengantaran	memberikan pengetahuan dan motivasi mengenai sanitasi, limbah pembuangan	memperluas mitra penjualan bahan pangan pokok sperti kelompok tani atau mitra penjualan lainnya untuk memperluas rantai pasokan pangan	Poktan, bulog, distributor grosir
3	Rumah Pangan B2SA	31 desa teras pangan B2SA di 31 kecamatan		Pengembangan Teras Pangan B2SA (Penambahan Fasilitasi Pangan Protein)	Pengembangan Pemasaran Produksi Teras Pangan B2SA	Kajian Inovasi Teras Pangan B2SA	Penguatan Kerjasama Penthalix antara Kwt dengan ABCGM		KWT, Desa, Kecamatan

NO	Rencana Aksi	Lokasi	Program	TAHUN RENCANA AKSI					Mitra OPD
				2026	2027	2028	2029	2030	
				Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi	Membangun Rencana Kerjasama Pengembangan Teras Pangan dengan Stakeholder	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi	
				Identifikasi Potensi Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (FGD/Kajian/workshop/rakor)	Pengembangan Kelembagaan Kelompok Penerima Mesin Olahan Pangan	Pengembangan Pemasaran Hasil Olahan Pangan Kelompok Penerima Manfaat	Penguatan Kerjasama dengan stakeholder untuk pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal	Produksi olahan pangan lokal yang continyu	KWT, UMKM, Desa, Kecamatan
				Fasilitasi Bantuan Mesin Olahan Pangan	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi	
				Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi					
				Sosialisasi Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal	Bimbingan Teknis Pengolahan Pangan Lokal (Untuk kelompok penerima manfaat)	Bimbingan Teknis Pengolahan Pangan Lokal (Untuk masyarakat di lokasi penerima manfaat)	Bimtek Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal Mendukung Stakeholder lainnya	Kajian/Workshok Analisis PUPL	TP-PKK, Desa, Kecamatan

NO	Rencana Aksi	Lokasi	Program	TAHUN RENCANA AKSI					Mitra OPD
				2026	2027	2028	2029	2030	
				Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi	
				Penguatan Kapasitas Petugas Survey Konsumsi Pangan	Pengembangan Kerjasama Piloting dengan Stakeholder lainnya	Pengembangan Kerjasama Piloting dengan Stakeholder lainnya	Pengembangan Kerjasama Piloting dengan Stakeholder lainnya	Evaluasi Kegiatan Piloting	TP-PKK, BPS, Kecamatan, Desa
				Survey Konsumsi Pangan 31 Kecamatan	Survey Konsumsi Pangan 31 Kecamatan	Survey Konsumsi Pangan 31 Kecamatan	Survey Konsumsi Pangan 31 Kecamatan	Survey Konsumsi Pangan 31 Kecamatan	
				Sosialisasi, Edukasi Pola Konsumsi Pangan (Sekolah, Masyarakat)	Sosialisasi, Edukasi Pola Konsumsi Pangan (Sekolah, Masyarakat)	Sosialisasi, Edukasi Pola Konsumsi Pangan (Sekolah, Masyarakat)	Sosialisasi, Edukasi Pola Konsumsi Pangan (Sekolah, Masyarakat)	Sosialisasi, Edukasi Pola Konsumsi Pangan (Sekolah, Masyarakat)	
4	Pengembangan Kawasan/ Sentra Perikanan								
	- Perencanaan		3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kajian Daya Dukung Perairan Kabupaten Bandung terhadap keberangsungan Budi Daya IKan Mas Majalaya	FS Pembentukan Kampung Pembudi Daya Ikan Nila	FS Pemetaan sentra kampung Ikan Hias	Studi Kelayakan Daeah Bojongsoang sebagai kawasan MIna Padi		
	- Kampung Perikanan Budidaya	KPB ikan lele Desa Padaulun Majalaya,	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN	Survei lokasi sentra dan identifikasi pelaku	Pembentukan sentra kampung pembudidaya sesuai dengan komoditas	Penerapan SOP teknik Pembudidayaan ikan	Integrasi pengawasan dan pelaporan dengan DPMPTSP, sistem OSS	Evaluasi kampung budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, BBWS, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jabar, DLH Provinsi Jabar, Baperida, DLH,

NO	Rencana Aksi	Lokasi	Program	TAHUN RENCANA AKSI					Mitra OPD
				2026	2027	2028	2029	2030	
		Desa Wangisagara Majalaya (ikan nila). Potensi Kawasan Ikan hias: Kecamatan Ciparay, Banjaran, Cimaung, Arjasari	DAN PERIKANAN						Diskominfo, DPMPTSP, Kab. Bandung
				Pendataan potensi dan CPCL pelaku usah di sentra	Penguatan kelembagaan kelompok	Pengawasan Rutin pelaku usaha	Peningkatan indeks kepatuhan kelompok	replikasi model sentra yang telah terbentuk	
				Penyusunan Kebutuhan pengawasan	Penguatan legalitas kelompok usaha	Pembinaan pelaku usaha	Peningkatan dan penguatan kemitraan kelompok	monitoring dan pelaporan berkala	
				Pendataan legalitas pelaku usaha di lokasi sentra	Sosialisasi regulasi teknis pengawasan pembudidaya ikan	monitoring dan pelaporan berkala	monitoring dan pelaporan berkala		
				monitoring dan pelaporan berkala	Verifikasi pelaku usaha pembudidaya perikanan				
					monitoring dan pelaporan berkala				
				SEKOLAM IKAN (Sekolah Manajerial Bagi	SEKOLAM IKAN (Sekolah Manajerial Bagi	SEKOLAM IKAN (Sekolah Manajerial Bagi	SEKOLAM IKAN (Sekolah Manajerial Bagi	SEKOLAM IKAN (Sekolah Manajerial Bagi	Kementrian Kelautan dan Perikanan, Pusat Pelatihan

NO	Rencana Aksi	Lokasi	Program	TAHUN RENCANA AKSI					Mitra OPD
				2026	2027	2028	2029	2030	
				Pembudi Daya Ikan), Di kawasan KPB Majalaya	Pembudi Daya Ikan), Di kawasan pembudi daya ikan mas	Pembudi Daya Ikan), Pembudi Daya IKan Hias	Pembudi Daya Ikan), Pembudi Daya IKan Hias	Pembudi Daya Ikan), Pembudi Daya IKan Hias	Keahlian Perikanan dan Kelautan FPIK UNPAD
				Pelatihan Kelembagaan The Series bagi pembudi daya ikan di Kabupaten Bandung	Pelatihan Kelembagaan The Series bagi pembudi daya ikan di Kabupaten Bandung	Pelatihan Kelembagaan The Series bagi pembudi daya ikan di Kabupaten Bandung	Pelatihan Kelembagaan The Series bagi pembudi daya ikan di Kabupaten Bandung	Pelatihan Kelembagaan The Series bagi pembudi daya ikan di Kabupaten Bandung	
				Pembinaan Kelembagaan on the spot bagi kelompok baru	Pembinaan Kelembagaan on the spot bagi kelompok baru	Pembinaan Kelembagaan on the spot bagi kelompok baru	Pembinaan Kelembagaan on the spot bagi kelompok baru	Pembinaan Kelembagaan on the spot bagi kelompok baru	
					DURI IKAN	DURI IKAN	DURI IKAN	DURI IKAN	
					Penguatan kelembagaan pembudi daya ikan mas	Pembinaan dan pendampingan kelembagaan pembudi daya ikan mas	Pembinaan dan pendampingan kelembagaan pembudi daya ikan Hias	Pembinaan dan pendampingan kelembagaan pembudi daya ikan Hias	
	- Pakan mandiri			identifikasi potensi pengembangan pakan mandiri (FGD/Kajian/workshop /rakor/fasilitasi uji kandungan pakan)	penguatan kelembagaan pelaku usaha pakan mandiri (pembentukan kelompok khsus pakan mandiri, pendampingan sertifikasi CPPIB)	peningkatan peluang kemitraan (rakor/workshop/ MoU dengan pembudidaya/produsen bahan baku pakan)	penguatan jejaring pemasaran pakan ikan (pendampingan pembuatan izin edar pakan/MoU dengan pembudidaya)	produksi pakan mandiri kontinyu	Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kab Bandung, Disperindag Kab Bandung

NO	Rencana Aksi	Lokasi	Program	TAHUN RENCANA AKSI					Mitra OPD
				2026	2027	2028	2029	2030	
				peningkatan sarana usaha (mesin pakan)	peningkatan sarana usaha (mesin pakan, mesin jahit karung/pengemasan pakan, bahan baku pakan)	perbaikan kualitas pakan mandiri (bimtek/workshop, fasilitasi uji mutu pakan, fasilitasi uji multilokasi)	peningkatan sarana usaha (mesin pakan, mesin jahit karung/pengemasan pakan, bahan baku pakan)	monitoring dan evaluasi	
				monitoring dan evaluasi	monitoring dan evaluasi	monitoring dan evaluasi	monitoring dan evaluasi		
	- Penumbuhan Wirausaha Baru			penumbuhan wirausaha baru perikanan sebanyak 15 penerima di wilayah kampung perikanan budidaya (Majalaya, Pacet, Ciparay, Paseh) 23 CPCL	penumbuhan wirausaha baru perikanan sebanyak 10 penerima di wilayah potensi budidaya lele (Baleendah, Banjaran, Bojongsoang) 14 CPCL -lokasi sesuai kritek musren lele	penumbuhan wirausaha baru perikanan sebanyak 8 penerima di wilayah potensi budidaya lele (Cileunyi, Nagreg, Cicalengka, Rancaekek) 12 CPCL -lokasi sesuai kritek musren lele dan dekat dg usaha pakan mandiri cimenyan	peningkatan kelembagaan dan peluang kemitraan	penguatan jejaring pemasaran	Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
				pendampingan, monitoring dan evaluasi	pendampingan, monitoring dan evaluasi	pendampingan, monitoring dan evaluasi	pendampingan, monitoring dan evaluasi	produksi ikan konsumsi kontinyu	
								pendampingan, monitoring dan evaluasi	

NO	Rencana Aksi	Lokasi	Program	TAHUN RENCANA AKSI					Mitra OPD
				2026	2027	2028	2029	2030	
				Bimbingan Teknis Budidaya Ikan Hias	Demplot teknologi budidaya ikan hias	Fasilitasi UPTD BBI dan Pokdakan Ikan Hias untuk mendapatkan CKIB	Fasilitasi Ekspor Ikan Hias	Pembangunan sentra ikan hias (Kawasan Edufishtainment)	BKHIT Provinsi Jawa Barat, BPPMHKP, Disperdagin, Disparekraf, DPUTR, KKP, BRIN, Disperkimtan, Diskop UKM
				Stimulan Sarana Usaha Ikan Hias	Fasilitasi Unit Karantina di Pembudi Daya Ikan / Suplier (CKIB)	Kontes Ikan Hias sebagai media promosi	Pendampingan	Pendampingan	
				Pendampingan dan Penyuluhan	Fasilitasi kemitraan pembudi daya Ikan Hias	Kajian kawasan sentra ikan hias	Pameran Ikan Hias		
					Bimbingan Teknis Budidaya Ikan Hias	Fasilitasi kelembagaan/asosiasi ikan hias	Temu Bisnis		
					Loka Karya	Kajian komoditas ikan hias unggulan / Pemetaan Segemntasi Komoditas Ikan Hias			
					Stimulat Sarana Usaha Ikan Hias	Pembangunan Digital Marketing Ikan Hias			
					Pendampingan dan Penyuluhan	Pengembangan Teknologi Ikan Hias (rekayasa genetik dll)			

NO	Rencana Aksi	Lokasi	Program	TAHUN RENCANA AKSI					Mitra OPD
				2026	2027	2028	2029	2030	
						Pendampingan dan Penyuluhan			
	- Sentra Pengolahan ikan	Astacita. Lokus: Pasirjambu (Cukanggenteng), Banjaran (Kiangroke), Bojongsoang (Lengkong, Bojongsari)	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pendataan CPCL pelaku usaha	Pembentukan sentra pengolahan	Pengawasan terpadu	Sistem pengawasan online	Evaluasi lintas sektor	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jabar, DLH Provinsi Jabar, Baperida, DLH, Diskominfo, DPMPTSP, Disperindag , Diskop UMKM, Dinkes, Dinas PMD Kab. Bandung
				Pendataan Izin usaha kelompok	Penguatan kelembagaan kelompok		Review perizinan	replikasi model sentra yang telah terbentuk	
				monitoring dan pelaporan berkala	Penguatan legalitas kelompok usaha		Pendataan produksi dan pengawasan terintregasi	monitoring dan pelaporan berkala	
					Sosialisasi regulasi teknis pengawasan pengolahan pemasaran perikanan				
					Verifikasi pelaku usaha pengolahan perikanan				
					monitoring dan pelaporan berkala				
					Legalitas izin usaha				

NO	Rencana Aksi	Lokasi	Program	TAHUN RENCANA AKSI					Mitra OPD
				2026	2027	2028	2029	2030	
					monitoring dan pelaporan berkala				
			3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	identifikasi potensi pengembangan sentra pemindangan ikan (FGD/Kajian/workshop/rakor)	Pengembangan kelembagaan poklahsar	peningkatan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan	peningkatan dan penguatan kerjasama untuk kemitraan dan pemasaran hasil perikanan	Terbentuknya Sentra pemindangan yang terpadu dan berkelanjutan	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Disperindag , Diskop UMKM, Dinkes, Diskominfo, Dinas PUTR, Dinas Parekraf, Baperida, Dinas PMD Kab. Bandung
				pendampingan, monitoring dan evaluasi	pendampingan, monitoring dan evaluasi	pendampingan, monitoring dan evaluasi	pendampingan, monitoring dan evaluasi	pendampingan, monitoring dan evaluasi	
				Penguatan SKP	Penguatan SKP	Penguatan SKP	Penguatan SKP	Penguatan SKP	
							Pelatihan HACCP	Pelatihan HACCP	

Sumber: Hasil Pengolahan Dispakan, 2025

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra Dispakan merupakan dokumen perencanaan pembangunan sesuai masa periode Bupati terpilih. Dokumen renstra digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, dan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Tantangan utama dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan di Kabupaten Bandung ditentukan oleh dukungan dari sektor-sektor terkait, *stakeholder* dan masyarakat. Sinergitas antara semua pihak mutlak diperlukan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Dispakan 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 5 (lima) tahun mendatang yang mengacu RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, diperlukan komitmen pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas;
2. Penjabaran lebih lanjut Renstra 2025-2029 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan Renja Dispakan;
3. Renstra Dispakan harus menjadi acuan Bidang/UPTD dalam penyusunan Renja.
4. Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra tahun 2025-2029 terdapat hal-hal diluar kendali Dinas, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra maka perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian target sasaran, sebagai berikut:

1. Pengendalian pelaksanaan rencana program dan kegiatan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Bidang/UPTD;
2. Sekretaris Dinas menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana program dan kegiatan dari masing-masing Pimpinan Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
3. Kepala Bidang/UPTD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya;
4. Sekretaris Dinas Menyusun evaluasi program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Bidang/UPTD;
5. Hasil evaluasi Renja menjadi bahan bagi penyusunan Renja untuk periode berikutnya.

Soreang, 17 September 2025

KEPALA DINAS

KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

TTD

UKA SUSKA PUJI UTAMA

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Definisi Operasional Dan Kamus Aktivitas

No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
1	Skor PPH Konsumsi		Hasil Perhitungan SUSENAS (BPS)	
2	Nilai Tukar Usaha Perikanan		Indikator ekonomi yang menggambarkan/ mengukur tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan. Nilai Tukar Usaha Perikanan ini dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima pembudiaya ikan dari hasil penjualan dengan indeks harga yang dikeluarkan untuk biaya produksi	
3	Persentase capaian tingkat konsumsi beras, sayur dan buah		Jumlah konsumsi beras, sayur dan buah aktual di bagi target konsumsi beras, sayur dan buah dikali 100 persen	
4	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK	Persentase Cadangan Pangan adalah perbandingan antara	

No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
		KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	jumlah cadangan pangan yang tersedia dengan jumlah kebutuhan pangan atau konsumsi pangan yang direncanakan, dinyatakan dalam bentuk persentase. Ini memberikan gambaran tentang seberapa baik cadangan pangan dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam periode waktu tertentu.	
5	Persentase lumbung pangan yang beroperasional baik	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah lumbung yang beroperasional baik dibagi jumlah lumbung di sentra padi yang aktif dikali 100 persen	
6	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah gabungan kelompok tani di sentra padi yang mendapatkan fasilitasi lumbung	Pemberian pendampingan kelembagaan dan stimulan isi lumbung pangan masyarakat
7	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah	

No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
			Kabupaten/Kota yang tersedia	
8	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Indikator asupan pangan tersedia cukup; Total energi yang dikonsumsi dibagi standar energi yg dibutuhkan dikali 100%	
9	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Total energi yang tersedia dibagi standar energi dikali 100%	
10	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah dokumen kesepakatan pasokan pangan strategis pada HBKN	Rapat koordinasi menjelang HBKN
11	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan bibit tanaman sayur dan buah	Pendampingan Teras Pangan B2SA (SIMPUL PANGAN LOKAL)
12	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan Gerakan Pangan Murah	Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM)

No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
13	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang menerima pembinaan dan bantuan alat pengolahan pangan untuk kelompok	Kegiatan pendampingan (monev) PUPL
14	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah kios pangan yang diberikan bantuan pangan	Kegiatan Pengembangan Kios Pangan
15	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Informasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kegiatan rapat koordinasi, pemantauan data stok bahan pangan ke pasar dan koordinasi dengan BULOG
16	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penyusunan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)
17	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan
18	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD)	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD, sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No. 15 Tahun 2023, adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana realisasi jumlah cadangan beras	

No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
			pemerintah daerah (CBPD) yang ada saat ini dibandingkan dengan jumlah cadangan beras yang ditargetkan dalam perencanaan atau kebijakan yang berlaku	
19	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
20	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah	Pengadaan Cadangan Pangan (Beras dan Bahan Pangan Lainnya)
21	Jumlah LPM yang terfasilitasi	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi	
22	Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Konsumsi beras/sayuran dan buah aktual dibagi Konsumsi beras/sayuran dan ideal kali 100 persen	
23	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Analisis Penyusunan Situasi Konsumsi Pangan
24	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi penerapan pola konsumsi B2SA	Pengembangan Desa B2SA

No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Berbasis Sumber Daya Lokal		
25	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah kecamatan yang dipantau dan dievaluasi konsumsi per kapita per tahun	
26	Persentase daerah rentan rawan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa dan Kelurahan Rentan Rawan Pangan dibagi Jumlah Desa Dan Kelurahan Total kali 100 persen	
27	Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	
28	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Analisis dan peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) yang dimutakhirkan	Pengumpulan data FSVA dan SKPG, rapat koordinasi dengan petugas pendata, dan sosialisasi hasil FSVA
29	Persentase lokasi daerah rentan rawan pangan yang diintervensi	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah lokasi daerah rentan rawan pangan yang diintervensi dibagi jumlah daerah rentan rawan pangan hasil FSVA tahun n-1 kali 100 persen	

No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
30	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerima cadangan pangan pemerintah daerah di lokasi rentan rawan pangan	Kegiatan rakor, operasional penyaluran bahan pangan
31	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi gerakan selamatkan pangan	Kegiatan sosialisasi, kampanye, serta inventarisasi horeka (program food rescue)
32	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Pelaksanaan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah kegiatan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi	intervensi hasil SKPG dengan sasaran balita gizi kurang dan operasional penyaluran
33	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	
34	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Berdasarkan keputusan Kepala Bapanas No. 52.1 Tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan keamanan pangan segar	
35	Persentase produk PSAT yang memiliki sertifikasi PSAT - PDUK	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Jumlah produk PSAT yang terbit/lolos registrasi PSAT PDUK dibagi jumlah pelaku	

No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
			usaha yang mendapatkan sosailisasi sertfikasi PSAT PDUK dikali 100 persen	
36	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persentase permohonan rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota yang terlayani	Sosialisasi dan Penerbitan Rekomendasi Nomor Registrasi PSAT-PDUK
37	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana uji sampel keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
38	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah kegiatan edukasi tentang keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Rapat dan sosialisasi keamanan pangan segar asal tumbuhan
39	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah kegiatan penguatan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Bimtek/pelatihan pengawasan keamanan pangan
40	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	

No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
41	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	
42	Nilai AKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	
43	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja tahun n+1, Renja Perubahan tahun n, RKA tahun n+1, RKAP, RKA Parsial (tentatif) dan Renstra (tentatif)	
44	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan evaluasi triwulan	
45	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LKIP, LKPJ, LPPD, IRB, SPIP, MR	
46	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
47	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	

No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
	dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
48	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen penatausahaan keuangan	
49	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
50	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan CALK	
51	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan	
52	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen pelaporan BMD	
53	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	

No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
54	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian	
55	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
56	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Kinerja Bulanan (LKB) Pegawai	
57	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
58	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen administrasi umum operasional dan pemeliharaan perkantoran	
59	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
60	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
61	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	

No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
62	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
63	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
64	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
65	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	Paket Bahan/Material yang Disediakan	
66	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
67	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
68	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan dokumen pengadaan BMD	
69	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Laapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
70	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Paket unit mebel yang disediakan	

No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
71	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
72	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
73	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan dokumen penyediaan jasa penunjang urusan	
74	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
75	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
76	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan dokumen pemeliharaan BMD	
77	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	

No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
78	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
79	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
80	Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH / WKDH	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Ketersediaan dokumen pemenuhan operasional KDH/WKDH	
81	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
82	Persentase Peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian sub Sektor Perikanan		NTUP tahun n dikurangi NTUP tahun n-1 di bagi NTUP tahun n-1 dikali 100 persen	
83	Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap tahun n dikurangi produksi perikanan tangkap tahun n-1 Dibagi produksi tahun n-1. kali 100 Persen	
84	Persentase perairan umum yang terevitalisasi	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan	Jumlah PU yang ditebar ikan dibagi total PU kali 100 persen	

No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
85	Persentase perairan umum yang terindikasi terdapat ikan	genangan air lainnyayang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah PU yang dimanfaatkan dibagi total PU yang terdapat ikan dikali 100 persen	
86	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Penyadiaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah perairan umum yang ditebar ikan	Restocking Ikan
87	Jumlah Sentra/Kampung berbasis perikanan yang memenuhi standar	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah kumulatif sentra/kampung berbasis perikanan yang terbangun	
88	Persentase sentra/kampung yang menerapkan hasil pengawasan	Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnyayang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Jumlah RTP dalam sentra/kampung yang diawasi dibagi total RTP dalam sentra/kampung kali 100 persen	
89	Pengawasan usaha pembudiyaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha pembudiyaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha pembudiyaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kegiatan Rapat/FGD/penyusunan kajian
90	Jumlah pelaku usaha pemasaran dan/atau usaha pengolahan hasil yang terawasi	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai	Jumlah pelaku usaha pemasaran dan/atau usaha pengolahan hasil yang terawasi	Kegiatan Rapat/FGD/penyusunan kajian

No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
		kewenangan kabupaten/kota		
91	Jumlah POKMASWAS yang dibina	Pembentukan sumber daya manusia pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah POKMASWAS yang dibina	Kegiatan sosialisasi terkait peraturan/ perundangan, bantuan kelengkapan operasional POKMASWAS, evaluasi kelembagaan
92	Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya tahun n dikurangi produksi perikanan budidaya tahun n-1 Dibagi produksi tahun n-1. kali 100 Persen	
93	Persentase pelaku usaha perikanan yang memiliki Nomor Izin Berusaha	Penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah kelompok penerima bantuan sarpras difasilitasi NIB di bagi jumlah target kelompok binaan dikali 100 persen	
94	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah pelaku usaha perikanan yang terbit NIB	Pendampingan pelayanan penerbitan Perijinan Pelaku Usaha Perikanan

No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
	Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		
95	Produksi perikanan budi daya	Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil	Jumlah produksi perikanan budidaya	
96	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang mendapatkan bantuan	Menyediakan bantuan bagi kelompok pembudi daya ikan (benih dan pakan)
97	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina	Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Pembudidaya Ikan melalui pembinaan dilapangan dan sosialisasi. Pemberian program sosiofish
98	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah wirausaha baru yang memperoleh pendampingan dan pelatihan tentang budi daya ikan	Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan dan pelatihan
99	Persentase kebutuhan sarana budidaya ikan yang terpenuhi	Pengelolaan pembudidayaan ikan	Jumlah kelompok penerima bantuan	

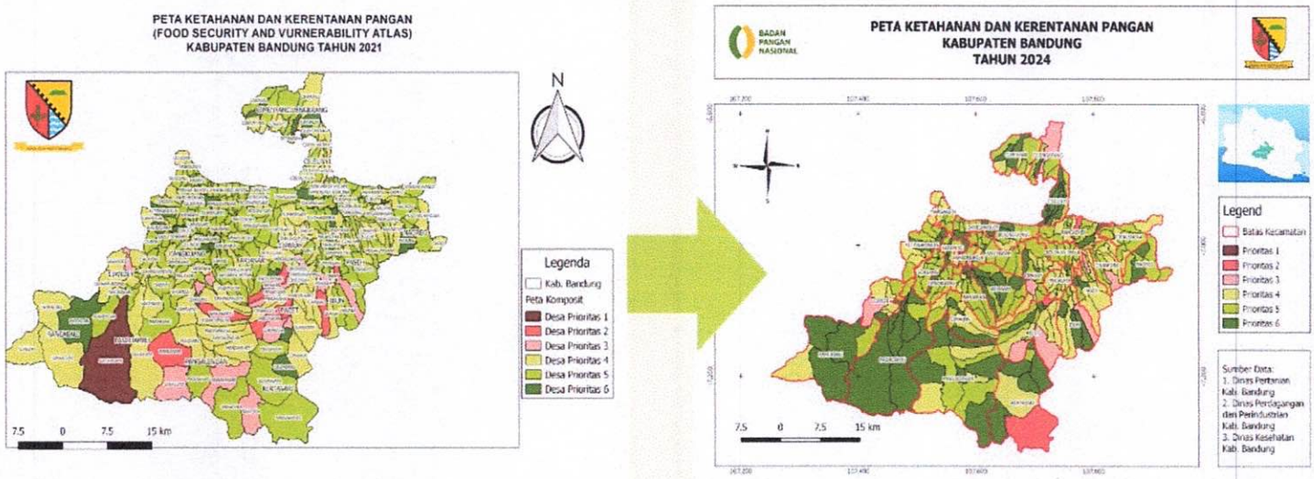
No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
			sarpras di bagi jumlah target kelompok binaan dikali 100 persen	
100	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Penghitungan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Sub Sektor Perikanan; Updating Data; Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan database perikanan
101	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan yang tersalurkan	Menyediakan bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok pembudi daya ikan dalam menunjang pengembangan teknologi budi daya perikanan (wadah budi daya, mesin pakan dan peralatan budi daya)
102	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi benih ikan hasil UPTD BBI	Operasional UPTD BBI (pengadaan induk ikan, pakan ikan, bahan kimia dan penunjang operasional lainnya)
103			Jumlah Sarana Kolam yang Beroperasional	
104	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan monitoring penyakit ikan	Monitoring lingkungan perikanan budi daya (penyediaan alat kualitas air) dan Pelayanan kesehatan ikan (penyediaan obat)

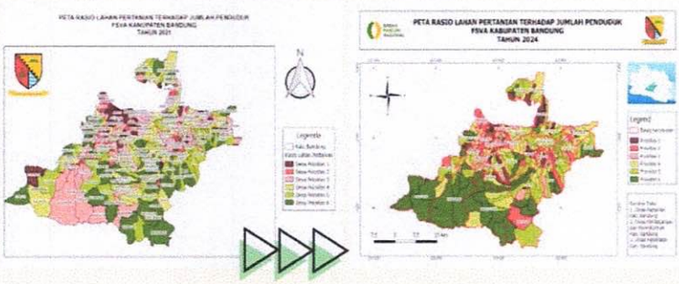
No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
105	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang terbina penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budi daya ikan yang baik (CBIB)	Pembinaan dan pendampingan penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budi daya ikan yang baik (CBIB) di pembudi daya ikan
106	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan pemanfaatan air yang tersusun	Kajian pemanfaatan/pengelolaan/daya dukung perairan terhadap pengembangan kawasan budi daya perikanan
107	Angka Konsumsi Ikan dalam Rumah Tangga	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Ikan yang dikonsumsi (Setara Utuh Segar) dibagi jumlah penduduk Pada Pemerintah Daerah Provinsi pada periode satu tahun.	
108	Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan		Jumlah produksi olahan ikan tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi tahun n-1 kali 100 persen	
109	Persentase peta pelaku pengolah dan pemasar perikanan yang digunakan	Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	Jumlah pengolah dan pemasar perikanan yang dibina dibagi populasi pengolah dan pemasar perikanan yakni	

No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
			sebanyak 80 hasil kajian sentra pengolahan hasil perikanan thn 2024	
110	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Penghitungan Nilai Tukar Produk Hasil Perikanan; Pendataan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan
111	Persentase pengolah dan pemasar yang memiliki sertifikat kompetensi	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah pengolah dan pemasar perikanan yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi populasi pengolah dan pemasar perikanan yakni sebanyak 408 hasil pendataan tahun 2024-2025	
112	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahandan Pemasaran Hasil	Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Jumlah kelompok pengolah dan pemasar yang mendapatkan pendampingan pengolahan	Pembinaan, Pendampingan/coaching clinic, Fasilitasi Sertifikasi Mutu dan Higeinitas Produk Hasil Perikanan

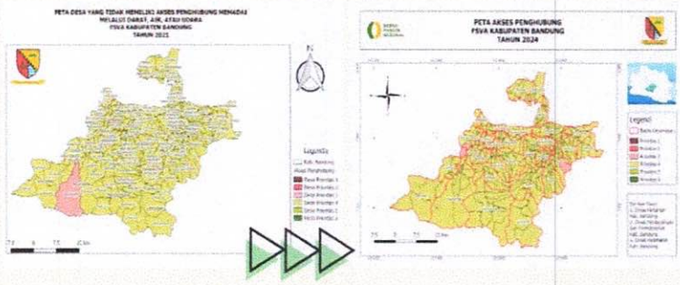
No	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Definisi Operasional	Kamus Aktivitas Subkegiatan
1	2	3	4	5
	Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
113	Persentase Peningkatan Ketersediaan ikan	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan ikan dari hasil budidaya, berokan, pasar, dan cold storage tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi tahun n-1 kali 100 persen	
114	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan stok ikan untuk pengolah dan pemasar ikan	Pemberian bantuan untuk pengolah/pemasar dalam rangka meningkatkan stok ketersediaan ikan untuk konsumsi; kegiatan Promosi Gemarikan penunjang konvergensi penanganan stunting
115	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pengolahan yang menerima bantuan	Pemberian sarana prasarana penunjang peningkatan kualitas dan produktivitas produk hasil perikanan

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)
KABUPATEN BANDUNG 2021-2024

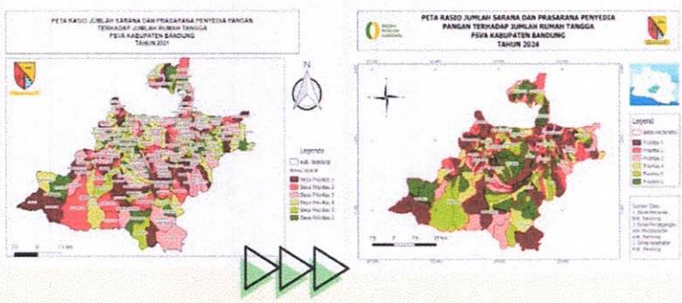




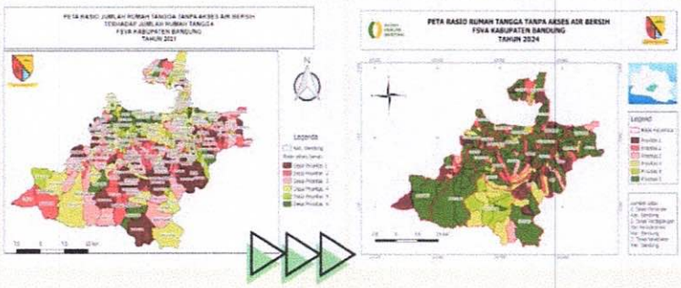
Tahun 2021, 140 desa termasuk potensi rentan terhadap ketersediaan lahan pertanian, menurun menjadi 108 desa tahun 2024



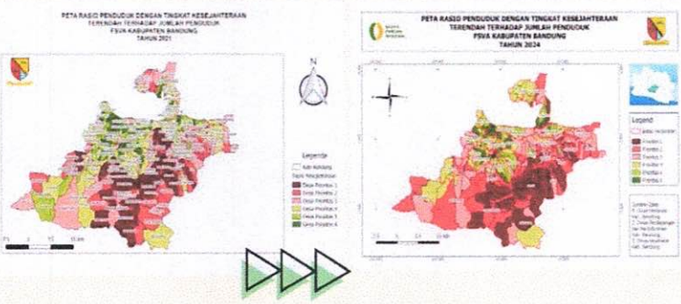
Tahun 2021, hanya 1 desa yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, meningkat menjadi 5 desa tahun 2024



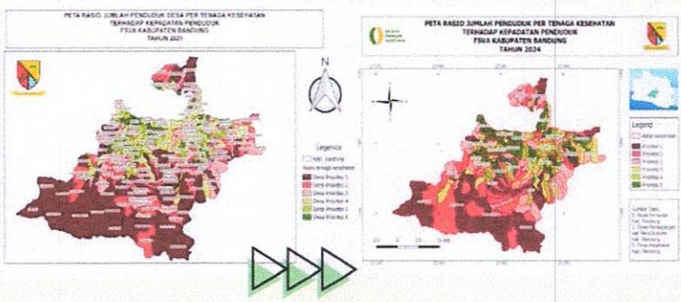
Tahun 2021, 140 desa termasuk potensi rentan terhadap ketersediaan sarana penyedia pangan, menurun menjadi 129 desa tahun 2024



Tahun 2021, 140 desa dengan rumah tangga tanpa akses air bersih, menurun menjadi 52 desa tahun 2024



Tahun 2021, 140 desa termasuk potensi rentan dengan rasio rumah tangga tingkat kesejahteraan terendah, meningkat menjadi 169 desa tahun 2024



Tahun 2021, 140 desa termasuk kategori dengan jumlah tenaga kesehatan rendah, menurun menjadi 104 desa tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 18

Tabel 2. 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 19

Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Dispakan 19

Tabel 2. 4 Saldo Aset Dispakan..... 20

Tabel 2. 5 Perbandingan Besaran Cadangan Beras Daerah, Provinsi, dan Pusat 22

Tabel 2. 6 Penguatan CPPD Kabupaten Bandung 2020-2024..... 23

Tabel 2. 7 Kelompok Penerima Hibah Stimulan Sarana Prasarana Budidaya dan Pengolahan Perikanan 2020-2024 25

Tabel 2. 8 Penyaluran CPPD Kabupaten Bandung 2021-2024..... 29

Tabel 2. 9 Skor PPH Konsumsi Kabupaten Bandung 2020-2024..... 31

Tabel 2. 10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung..... 32

Tabel 2. 11 Hasil Capaian SDGs 2022-2024 39

Tabel 2. 12 Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Dispakan 2021-2024 40

Tabel 2. 13 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 68

Tabel 2. 14 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 70

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dispakan 75

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Dispakan..... 76

Tabel 3. 3 Lokasi Khusus Sasaran Program 78

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 79

Tabel 4. 1 Rumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan 82

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan ... 105

Tabel 4. 3 Program, Kegiatan/Subkegiatan Prioritas 144

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama 146

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci 147

Tabel 4. 6 Indikator dan Target Pelaksanaan TPB/SDGs 2025-2029 149

Tabel 4. 7 *Crosscutting* Program Tematik Pembangunan (Penguatan Simpul Pangan) 152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dispakan 17

Gambar 2. 2 IKP Kabupaten Bandung 2020-2024 21

Gambar 2. 3 Capaian Produksi Perikanan Budidaya 2020-2024 23

Gambar 2. 4 Capaian Produksi Perikanan Tangkap 2020-2024 26

Gambar 2. 5 Capaian Produksi Ikan Olahan 2020-2024 26

Gambar 2. 6 Desa Potensi Rentan Rawan Pangan 2020-2024 34

Gambar 2. 7 Dukungan BUMD untuk Pengelolaan CPPD 56

Gambar 3. 1 Keterkaitan Sasaran RPJMD dan Renstra..... 74